



LAPORAN KINERJA

**PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Painan, 28 Maret 2024



Rusdianto, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196411121992031008

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Syukur Alhamdulillah kami sampaikan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah dapat diselesaikan sebagaimana target waktu yang sudah ditentukan. LKjIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa setiap Bupati/Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan ini juga merupakan media akuntabilitas yang menjelaskan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pengguna sumber daya dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan “ **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional** ”, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, serta menginformasikannya kepada masyarakat terkait dengan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2023.

Pada Tahun ini telah dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai tindak lanjut Rasionalisasi terhadap RPJMD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas serta sebagai bentuk kolaborasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan. Maka dari itu kami mengharapkan adanya informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi serta kritikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Painan, 27 Maret 2024

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, sebanyak 11 (sebelas) indikator nilainya termasuk kategori **Sangat Baik** dan sebanyak 1 (satu) indikator nilainya termasuk kategori **Cukup** yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan.

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 118,28%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	60,5	71,56	118,28

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pencapaian Kinerja untuk 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 sebesar 101,21%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1. Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,59	72,24	102,34
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	tahun	71,39	73,27	102,63
2.1.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan	Persen	6,9	7,34	93,62
		2. Pengeluaran per Kapita	Rp./orang/tahun	9.369.000	9.953.000	106,23
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 2						101,21

MISI 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 101,59%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,65	5,14	110,54
		2. Nilai PDRB	Trilyun Rupiah	10,409	10,183*	97,83
		3. Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,259	96,40
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 3						101,59

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 4 sebesar 98,59%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	5700	5620	98,59

MISI 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 84,17%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Baik** Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.1.1	Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas	1. Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	persen	13	7,27	55,82
5.1.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Indek Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,350)	Tinggi (3,770)	112,53
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 5						84,17

MISI 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 6 sebesar 99,89%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori ***Sangat Baik***. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.1.1	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	1. Indek Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	71,42	71,34	99,89



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Selatan.....	3
1.5 Strukur Organisasi	6
1.6 Kepegawaian	7
1.7 Sistematika Penyusunan	9
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan.	13
2.1.1 Visi	13
2.1.2 Misi	14
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran.	14
2.2 Perjanjian Kinerja.	16
2.3 Indikator Kinerja Utama.	17
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja.....	20
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.	22
3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	23
3.4. Realisasi Anggaran	133
BAB IV	
PENUTUP	135
4.1. Kesimpulan	135
4.2. Saran	135
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.....	4
Tabel	1.2	Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023.....	5
Tabel	1.3	Data Jumlah PNS Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020-2023 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Tabel	1.4	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2020-2023.....	11
Tabel	2.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	15
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.	16
Tabel	2.3	Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan.....	17
Tabel	3.1	Klasifikasi Penilaian dan Katagori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023.....	21
Tabel	3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2023.....	22
Tabel	3.3	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2023.....	24
Tabel	3.4	Katagori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	33
Tabel	3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023.....	35
Tabel	3.6	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023.....	45
Tabel	3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023.....	46
Tabel	3.8	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2023.....	48
Tabel	3.9	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2021-2023.....	49
Tabel	3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.....	53
Tabel	3.11	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2023.....	53
Tabel	3.12	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2021-2023.....	54
Tabel	3.13	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengeluaran per Kapita Tahun 2023.....	58



Tabel	3.14	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran per Kapita Tahun 2021-2023.....	59
Tabel	3.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.....	61
Tabel	3.16	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023.....	62
Tabel	3.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2023.....	62
Tabel	3.18	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2023.....	65
Tabel	3.19	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2021-2023.....	65
Tabel	3.20	Capaian Produksi Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023.....	67
Tabel	3.21	Luas Lahan Sawah per Kecamatan Tahun 2023.....	68
Tabel	3.22	Jumlah Bantua Benih/Bibit Tanaman yang telah disalurkan ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan Baik itu Sumber Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maun APBN Tahun 2023.....	73
Tabel	3.23	Jumlah Ternak yang disalurkan ke Kelompok Tani Tahun 2023.....	80
Tabel	3.24	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2023.....	86
Tabel	3.25	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023-2023.....	87
Tabel	3.26	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2023.....	88
Tabel	3.27	Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023.....	89
Tabel	3.28	Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah per Cabang Industri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023.....	89
Tabel	3.29	Rekapitulasi Fasilitasi Legalitas Produk IKM Tahun 2021-2023.....	94
Tabel	3.30	Rekapitulasi Legalitas Produk IKM yang terbit Tahun 2021-2023.....	94
Tabel	3.31	Perbandingan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) dengan Provinsi Sumatera Barat.....	96
Tabel	3.32	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan Provinsi Sumatera Barat.....	96
Tabel	3.33	Perkembangan Nilai PDRB (ADHK) Sektor Industri Pengolahan dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2021-2023.....	96
Tabel	3.34	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2023.....	101
Tabel	3.35	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2021-2023.....	102
Tabel	3.36	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun	104



		2023.....	
Tabel	3.37	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021-2023.....	105
Tabel	3.38	Daftar Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	107
Tabel	3.39	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan Tahun 2023.....	110
Tabel	3.40	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan Tahun 2021-2023.....	113
Tabel	3.41	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2023.....	117
Tabel	3.42	Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	120
Tabel	3.43	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2021-2023.....	123
Tabel	3.44	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2023.....	130
Tabel	3.45	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2021-2023.....	130
Tabel	3.46	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	6
Gambar	1.2	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2023.....	10
Gambar	1.3	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2023	11
Gambar	3.1	Perbandingan Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023	50
Gambar	3.2	Kegiatan Perbanyak Benih Dasar Padi Sawah Parietas Bawaan	72
Gambar	3.3	Penyaluran Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	73
Gambar	3.4	Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengolahan Tanah untuk Budidaya Pertanian	74
Gambar	3.5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Sumber Dana DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023	75
Gambar	3.6	Penyaluran Pompa Air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan	76
Gambar	3.7	Penanaman Sistem Jajar Legowo 2:1 (Sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (Sebelah kanan)	77
Gambar	3.8	Pemangkasan Tanaman Upaya peningkatan produksi dan produktifitas Tanaman	77
Gambar	3.9	Pemantauan Luas Tanam Padi Sawah menggunakan drone (Pengadaan DAK Fisik Bidang Pertanian) Tahun 2023	78
Gambar	3.10	Pendidikan dan Pelatihan Petugas serta pembinaan Kelompok Tani Tahun 2023	79
Gambar	3.11	Aktifitas Peningkatan Populasi ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2023	81
Gambar	3.12	Hasil Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2023	81
Gambar	3.13	Penyaluran Ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	82
Gambar	3.14	Pameran Inacraft Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC)	91
Gambar	3.15	Minang Kabau Fashion Heritage 2023 di JCC	92
Gambar	3.16	Lomba Desain Busana Muslimah di Padang	92



Gambar 3.17	Lomba Desain Busana Batik Minang di Kota Sawahlunto	92
Gambar 3.18	Dokumentasi Pembangunan Sentra IKM Gambir Kecamatan Sutera	93
Gambar 3.19	Rehab Sentra IKM Minyak Atsiri	94

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang dimandatkan kepada masyarakat. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diwujudkan dengan penerapan sistem akuntabilitas. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKjIP disusun secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun LKjIP Tahun 2023 merupakan Laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun ketiga dari lima tahun perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD ini merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Penyusunan LKjIP ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026.

1.4. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

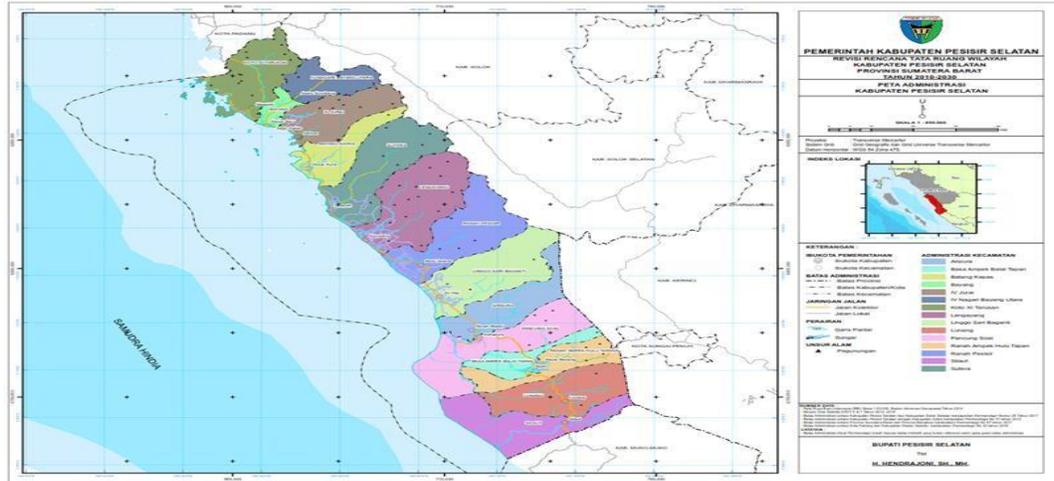
A. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera, sebelah Timur berbatasan dengan deretan pegunungan Bukit Barisan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Painan sebagai Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 78 Km dari Kota Padang–Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan gerbang Selatan Provinsi Sumatera Barat, karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Secara astronomis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di $0^{\circ} 57' 31, 21''$ LS - $2^{\circ} 28' 42, 32''$ LS dan $100^{\circ} 17' 48,64$ BT - $101^{\circ} 17' 34,3$ BT.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah terluas di provinsi Sumatera Barat, yaitu $\pm 6.049,34$ km², atau 14,22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pesisir Selatan secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) Provinsi Jambi.

B. Wilayah Administratif



Pada tahun 2023, bentuk wilayah administratif Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah Kecamatan, 182 Nagari dan 480 kampung. Secara rinci jumlah nagari dan kampung per kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung	Luas Wilayah	
				(Km2)	(%)
1	Koto XI Tarusan	23	51	437,37	7,71
2	Bayang	17	45	80,92	3.34
3	IV Nagari Bayang Utara	6	17	242,33	0.01
4	IV Jurai	20	52	368,19	0.09
5	Batang Kapas	9	29	277,54	5.59
6	Sutera	12	32	569,81	4.42
7	Lengayang	9	45	632,96	4.46
8	Ranah Pesisir	10	27	562,44	3.30
9	Linggo Sari Baganti	16	43	557,66	2.22
10	Air Pura	10	20	380,10	2.28
11	Pancung Soal	10	24	547,41	0.05
12	Basa Ampek Balai Tapan	10	22	187,46	1.10

13	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	18	281,96	6.60
14	Lunang	10	28	456,73	5.55
15	Silaut	10	27	466,45	7.71
	JUMLAH	182	480	6.049,33	100,00

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2023

C. Kondisi Demografis

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. Sedangkan kondisi demografis ialah informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan adalah 525.355 jiwa. Kecamatan terbanyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Lengayang dengan jumlah sebanyak 63.607 jiwa dan paling sedikit adalah pendudukan yang berada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu sebanyak 8.549 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 sampai tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan
Tahun 2022-2023

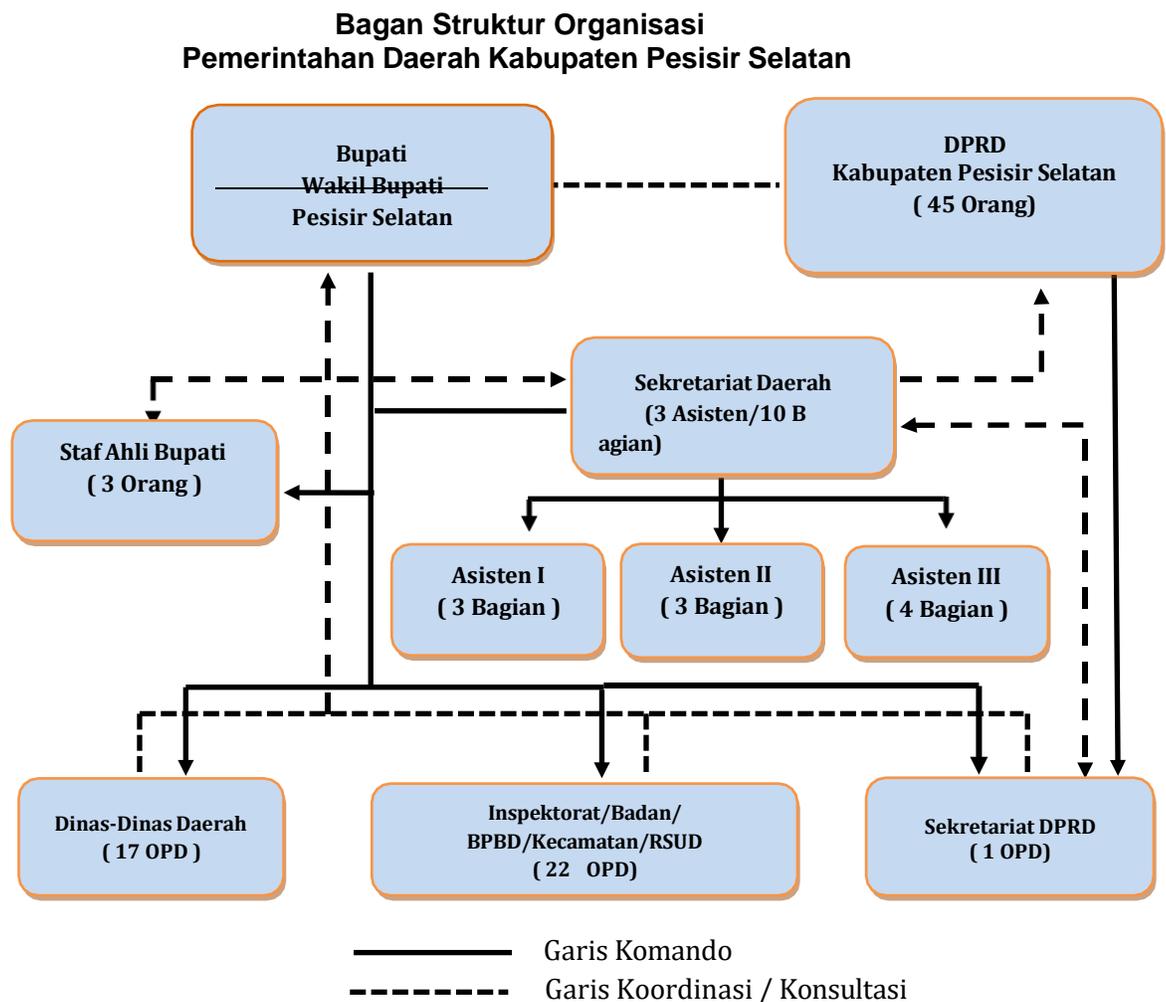
No.	Kecamatan	Tahun	
		2022	2023
1	Silaut	15.592	16.671
2	Lunang	22.423	23.617
3	Basa Ampek Balai Tapan	15.487	16.324
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	15.499	16.167
5	Pancung Soal	26.570	27.519
6	Airpura	18.180	19.496
7	Linggo Sari Baganti	49.169	51.027
8	Ranah Pesisir	33.760	34.682
9	Lengayang	60.994	63.607
10	Sutera	56.091	59.025
11	Batang Kapas	36.422	37.982
12	IV Jurai	50.894	52.994
13	Bayang	42.181	43.638
14	IV Nagari Bayang Utara	8.286	8.549
15	Koto XI Tarusan	52.870	54.057
	Kabupaten Pesisir Selatan	504.418	525.355

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka tahun penerbitan, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 berdasarkan data Pesisir Selatan Dalam Angka yang dipublikasikan oleh BPS adalah 525.355 jiwa, yang terdiri dari 264.292 orang laki-laki dan 261.063 orang perempuan. Jumlah ini naik sebesar 20.937 jiwa dari tahun 2022.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

A. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bagian Organisasi
 - d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab secara operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Bagian Umum
2. Bagian Persidangan dan Risalah
3. Bagian Keuangan dan Bina Program
4. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

3) Dinas Daerah

Dinas Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) Dinas yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
6. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Perikanan dan Pangan
12. Dinas Pertanian
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

D. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah dibentuk terdiri dari :

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

E. Lembaga Lainnya

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

F. Pemerintahan Kecamatan

Pemerintahan Kecamatan terdiri dari 15 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Koto XI Tarusan
2. Kecamatan Bayang
3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
4. Kecamatan IV Jurai

5. Kecamatan Batang Kapas
6. Kecamatan Sutera
7. Kecamatan Lengayang
8. Kecamatan Ranah Pesisir
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti
10. Kecamatan Pancung Soal
11. Kecamatan Air Pura
12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
14. Kecamatan Lunang
15. Kecamatan Silaut

1.6. KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Aparatur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebanyak 5.621 orang, terdiri dari 1.762 orang laki laki atau 31,35% dan 3.859 orang Perempuan atau 68,65%, sebagaimana tergambar pada tabel 1.3 dan gambar 1.2 berikut ini :

Tabel 1.3

**Data Jumlah PNS Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020–2023 Berdasarkan Jenis Kelamin**

TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
TAHUN 2020	6,506	4,347	2,159
TAHUN 2021	6,334	4,279	2,055
TAHUN 2022	5,918	4,027	1,891
TAHUN 2023	5,621	3,859	1,762

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, per 31 Desember 2023



Gambar 1.2 Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2023

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jenjang pendidikan pendidikan S2 sebanyak 474 orang sedangkan jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 3.650 orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya aparatur, disusul oleh jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 970 orang, SMA sebanyak 495 orang, SMP sebanyak 29 orang dan SD sebanyak 3 orang. Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel. 1.4
Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2023

Tahun	Jenis Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	DI/DII/DIII	DIV/S1	S2	S3	
Tahun 2020	11	46	833	1,252	3970	394		6,506
Tahun 2021	8	31	674	1,124	4084	412		6,333
Tahun 2022	4	26	550	1,043	3903	392		5,918
Tahun 2023	3	29	495	970	3650	474		5621

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, 2022, per 31 Desember 2023



Gambar 1.3 : Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda
Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2019-2023

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. **Capaian Kinerja Pemerintah Daerah**
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, evaluasi dan analisa capaian kinerja
 - b. **Realisasi Anggaran**
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran kondisi perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA,
MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN
YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan

Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

Profesional : Penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

VISI
“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL “

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Memperkuat Tata Kelola, Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	2.1	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat	2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat
		2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.2.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		2.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	2.3.1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
3	Memperkuat Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	3.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan
4	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Nyaman dan Berkesan	4.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat
5	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	5.1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	5.1.1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas
		5.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	5.2.1	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenram dan Dinamis	6.1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Damai,	6.1.1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Damai

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan Rasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali Revisi. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah Rasionalisasi terhadap RPJMD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1.1	Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	60,5
2	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	70,69
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,39
4	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	4.1	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,9
		4.2	Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/tahun	9.369.000
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	5.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,65
		5.2	Nilai PDRB (AHK)	Triliyun Rupiah	10,409
		5.3	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25
6	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	6.1	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	5.700
7	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	7.1	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	Persen	13

8	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	8.1	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,350)
9	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Damai	9.1	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	71,42

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

Perjanjian Kinerja Bupati Pesisir Selatan Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Bupati Pesisir Selatan 2023 ini.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021- 2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2023
Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	
				SUMBER DATA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
1.	Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	60,5	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Hasil evaluasi Kemen PAN RB
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	70,69	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS	$IPM = \frac{1}{3} [I \text{ kesehatan} + I \text{ pendidikan} + I \text{ pengeluaran}]$ $I \text{ kesehatan} : \frac{UHH - UHH \text{ min}}{UHH \text{ maks} - UHH \text{ min}}$ $UHH = \text{Usia Harapan Hidup}$ $I \text{ pendidikan} : \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$ $HLS = \text{Harapan Lama Sekolah}$ $I \text{ pengeluaran} : \frac{\ln(RLS) - \ln(RLS \text{ min})}{\ln(RLS \text{ maks}) - \ln(RLS \text{ min})}$ $RLS = \text{Rata-Rata Lama Sekolah}$

					$\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})$
3.	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,39	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS	$UHH - UHH \text{ min } UHH \text{ maks} - UHH \text{ min}$ $UHH = \text{Usia Harapan Hidup}$
4.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,9	Publikasi BPS	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ Z = garis kemiskinan Yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3, ..., q), yi<z Q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan N = jumlah penduduk
5.	Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang /tahun	9.369.000	Publikasi BPS	$Y^* = Y \text{ IHK} \times 100\%$ $Y^* = \text{Pengeluaran per kapita harga konstan } Y = \text{Pengeluaran per kapita setahun IHK} = \text{Indeks Harga Konsumen tahun dasar}$
6.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,65	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS	$\frac{PDRB(t-1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$
7.	Nilai PDRB (AHK)	Triliyun Rupiah	10,409	Jumlah PDRB ADHK pada tahun berjalan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan atau setiap kategori dari taun ke tahun. PDRB ADHK merupakan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam indikator ini harga tahun 2010

					digunakan sebagai dasar penilaiannya
8.	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	Publikasi BPS	$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})}{2}$ <p>Pi = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai indek Gini berkisar antara 0 dan 1, jika : $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>
9	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	5.700	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam 1 (satu) tahun
10..	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	Persen	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah sekolah SD dan SMP yang sudah mencapai SNP : $\frac{\text{Jumlah sekolah SD dan SMP}}{\text{Jumlah sekolah SD dan SMP}} \times 100\%$
11	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,350)	Hasil penilaian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)	Penilaian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
12	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	71,42	Publikasi BPS	Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)

Sumber: RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021- 2026. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKJIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran dengan bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, laporan keuangan Perangkat Daerah/laporan keuangan pemerintah daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya ;
2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
 - a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya perwujudan visi dan misi kepala daerah. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2023

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI 1 : Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan						
1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	60,5	71,56	118,28
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat						
2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1. Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,59	72,24	102,34
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	tahun	71,39	73,27	102,63
2.1.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan	Persen	6,9	7,34	93,62
		2. Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/tahun	9.369.000	9.953.000	106,23
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah						
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,65	5,14	110,54
		2. Nilai PDRB	Trilyun Rupiah	10,409	10,183*	97,83
		3. Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,259	96,40
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan						
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi	1. Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	5700	5620	98,59

	Kesejahteraan Masyarakat						
MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
5.1.1	Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas	1.	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	persen	13	7,27	55,82
5.1.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1.	Indekend Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,350)	Tinggi (3,770)	112,53
MISI 6 : Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan dinamis							
6.1.1	Terciptanya kondisi , Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	1.	Indek Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	71,42	71,34	99,89
Rata-rata Capaian Indikator 9 Sasaran Strategis : 12 Indikator Kinerja							99.56

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 12 (dua belas) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 99,56%, sebanyak 11 (sebelas) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**, sebanyak 1 (satu) indikator nilainya predikat **Cukup**.

3.3. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	60,5	71,56	118,28

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Hasil Evaluasi Kemen PAN RB

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah B (60,5) dan terealisasi BB (71,56) dengan capaian indikator kinerja adalah 118,28%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Indek Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Presiden mengamatkan agar RB berdampak, RB bukan tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif dan melayani masyarakat. RB perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi 2020 – 2024 menyatakan bahwa dilakukan penajaman pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut RB General dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik dengan 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik..

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan pelaksanaan RB di seluruh Perangkat Daerah sepanjang tahun 2023 dengan melaksanakan RB General melalui prioritas kegiatan utama dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, 21 (dua puluh satu) kegiatan utama yaitu sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile. Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pasca penyederhanaan birokrasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, selanjutnya pemerintah daerah menerapkan sistem kerja baru sesuai dengan Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional. Indeks SPBE berhasil dapat ditingkatkan, yaitu dari 3,34 pada tahun 2021 3,48 pada tahun 2022, menjadi 4,17 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung digitalisasi birokrasi melalui penerapan SPBE yang terintegrasi, sehingga upaya

pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah dan cepat, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan.

4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini terlihat dari dijadikannya SAKIP sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD 2 (dua) periode pemerintahan dan nilai akuntabilitas selalu menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, dalam 6 (enam) tahun terakhir nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengalami peningkatan, sampai tahun 2023 masih dalam predikat “B” (69,21).
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital.
Komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Tingkat Kematangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan SPBE 4,17. Kualitas digital birokrasi semakin positif, ini tercermin pada Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dari tahun sebelumnya.
6. Pembangunan Zona Integritas.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mencanangkan Zona Integritas pada Tahun 2023 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam tahapan persiapan pembangunan Zona Integritas yang direncanakan pada 2 (dua) Perangkat Daerah. Upaya untuk membangun komitmen, penyamaan persepsi serta rencana aksi dalam mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus dilakukan melalui sosialisasi.
7. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan laporan Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP pada tahun 2023 tingkat capaian 2,962 yang bermakna Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Tingkat Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern

8. **Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.**
Komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Tingkat kematangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Aplikasi SP4N LAPOR! Semakin positif, ini tercermin pada Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) terdiposisi selesai atau setiap pengaduan selalu ditindaklanjuti.
9. **Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi.**
Dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan beberapa upaya/kegiatan diantaranya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pembinaan secara berkala serta untuk mengukur tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi dalam pemetaan, pencegahan, dan mitigasi rawan korupsi di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat dari Survei Penilaian Integritas (SPI) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melibatkan responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penilaian Survei Penilaian Integritas memotret integritas sebuah lembaga, semakin rendah nilai SPI menunjukkan bahwa risiko korupsi pada lembaga tersebut semakin tinggi. Dengan menggunakan skala dari 0 hingga 100, nilai capaian Survei Penilaian Integritas Internal oleh KPK untuk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 mencapai 74,77.
10. **Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik.**
Indeks kualitas kebijakan (IKK) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 yaitu 50, kebijakan tingkat instansi dalam kerangka IKK kebijakan sudah jelas, memberikan manfaat kepada stakeholder terkait dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, memiliki naskah kebijakan yang lengkap dan terdapat kebijakan yang telah dievaluasi, namun masih perlu ditingkatkan sehingga bermanfaat secara optimal bagi stakeholder terkait dan masyarakat.
11. **Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
Dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah telah berkomitmen bahwa setiap rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah wajib dilakukan

pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi bersama aparatur perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Setiap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan kemudian disebarluaskan secara elektronik melalui laman website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Laman JDIH Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah terintegrasi dengan laman JDIH Nasional. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yaitu 56,76 Pelaksanaan Reformasi Hukum cukup, pelaksanaan Reformasi Hukum perlu menjadi Baik dan ditingkatkan.

12. Pelaksanaan Arsip Digital.

Pada tingkat Perangkat Daerah sudah dilakukan peningkatan kemampuan pengolah, sehingga operasional bisa menjalankan sistem kearsipan berbasis elektronik melalui aplikasi Srikandi. Karena Aplikasi ini merupakan aplikasi dari pemerintah pusat dan masih banyak kendala serta belum sempurnanya fitur yang ada pada aplikasi terutama dalam penyimpanan kearsipan secara keseluruhan tidak bisa dilakukan. Keterbatasan bandwidth internet ditingkat operator juga memperlambat jalannya proses administrasi persuratan dalam aplikasi. Pada akhir tahun 2023 hampir seluruh Perangkat Daerah sudah menerapkan aplikasi Srikandi, namun belum maksimal.

13. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral.

Untuk mendukung kinerja birokrasi, telah diukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Pesisir Selatan oleh Badan Pusat Statistik, dimana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 memperoleh Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 1,62 masih berada pada predikat kurang, untuk itu perlu mengatur jadwal rilis dari masing-masing Produsen data.

14. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa oleh setiap Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun Skor final Penilaian indeks tata kelola pengadaan Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 70.3 dengan predikat Baik.

15. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur

kedudukan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemberian opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan lingkup Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2022 berdasarkan surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi Sumatera Barat, nomor 81/S-HP/XVIII.PDG/05/2023, tanggal 12 Mei 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menginformasikan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan berhasil mempertahankan opini WTP. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Capaian opini WTP bagi pemerintah daerah sebagai bukti perwujudan keberhasilan atas tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh piagam opini 2012-2023 WTP ke 10 kali.

16. Penataan Jabatan Fungsional.

Sebagai langkah pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan jabatan fungsional tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional. Namun saat ini, ada beberapa jabatan fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional yaitu pejabat fungsional yang disetarakan.

17. Penguatan Manajemen Talenta ASN.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk peningkatan implementasi manajemen talenta diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Assesment serta melaksanakan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/76/BKPSDM/2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Tahapan Assesment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan saat ini dilaksanakan dalam pelaksanaan seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dengan adanya Assesment dalam pelaksanaan kegiatan seleksi terbuka ini, diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin masa depan (future leaders).

18. **Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.**
Komitmen Pemerintah Daerah untuk menghasilkan ASN yang memiliki kualitas dan kapasitas diwujudkan melalui pengelolaan kinerja ASN menggunakan aplikasi etpp.pesisirselatankab.go.id. Dengan adanya penerapan pengelolaan kinerja ASN melalui aplikasi etpp.pesisirselatankab.go.id yang berkaitan langsung dengan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadikan tingkat pengelolaan kinerja ASN tercapai maksimal yaitu 100%.
19. **Penguatan Sistem Merit.**
Pada saat ini Indeks Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 meraih nilai 243,5 dengan kategori kurang. BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan sebagai koordinator pada penilaian sistem merit ini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai sistem merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan salah satunya yaitu melakukan coaching and mentoring secara periodik dan rutin dengan pihak KASN. Disamping itu, upaya peningkatan nilai sistem merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan tercapai jika tidak adanya dukungan dari seluruh ASN dan Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta jika tidak didukung dengan anggaran yang memadai.
20. **Pelaksanaan Core Values ASN.**
BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja ASN yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima, sehingga menjadi pendasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen mewujudkannya melalui penerapan logo BerAKHLAK dan tagar Employer Branding serta penerapan nilai BerAKHLAK pada setiap ASN dalam melaksanakan tugasnya, nilai Survei Indeks BerAKHLAK Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 adalah 61,3% Cukup Sehat Kategori : B.
21. **Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.**
Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui pembinaan dan perbaikan secara terus menerus dan komprehensif terhadap unit penyelenggara pelayanan publik Pelaksanaan pelayanan publik di

lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata pada tahun 2023 yaitu 90,02 dan juga dapat dilihat dari nilai hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 yaitu 4,33 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023 yaitu 79.33 Zona Hijau, Kategori B, Kualitas Tinggi, dari nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsistensi dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain melaksanakan RB General sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga melaksanakan RB Tematik yang merupakan strategi baru dalam dalam *Road Map* RB sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan.

Program-program pengentasan kemiskinan telah difokuskan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, namun penurunan tingkat kemiskinan belum tercapai dari target 6,9% realisasi 7,34% dengan capaian 94,01%, meskipun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah berupaya dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, upaya percepatan masih perlu dilakukan mengingat capaian ini masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 7 persen dan tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan masih berada diatas capaian propinsi. Naiknya angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat pesisir selatan berada dalam kondisi rentan miskin.

2. Peningkatan Investasi.

Investasi daerah berperan penting dalam Upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui investasi akan bermunculan bisnis-bisnis baru yang akan menyerap lapangan pekerjaan sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya daya beli konsumen dan konsumsi rumah tangga. Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 918.741.364.117 yang terdiri dari Investasi Usaha Mikro Kecil yang bergerak di sektor perikanan, peternakan, perumahan, konstruksi, industri barang dari kayu, rotan dan

lainnya, pertambangan, perhotelan dan sebagainya yang merupakan usaha perseorangan maupun badan usaha yang dimiliki WNI dan WNA.

3. Digital Administrasi Pemerintahan.

Capaian indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menggambarkan realisasi layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. Pada tahun 2023 Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan adalah 4,17 dengan capaian 103.88% melebihi target tahun 2023 yaitu 3,55. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat persoalan yang dihadapi dalam upaya melakukan digitalisasi seperti Belum optimalnya penerapan manajemen SPBE, Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Berbasis elektronik. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang terintegrasi serta masih kurangnya SDM bidang informatika dan statistik.

4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi.

Pada Tahun 2023, Pesisir Selatan tidak melakukan review PDN jadi untuk capaian PDN tetap meamakai capaian tahun 2022. Pada tahun 2022 berdasarkan hasil rewieu Inspektorat Bersama BPKP, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki realisasi PDN sebesar 54, 84 %. Hal ini dapat dikategorikan rendah disebabkan jauh dari target nasional. Rendahnya realisasi PDN tahun 2022 ini karena masih terdapat hal-hal yang belum terpenuhi terkait upaya untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Untuk itu, BPKP memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan guna meningkatkan capaian penggunaan produk dalam negeri mengingat target penggunaan produk dalam negeri tahun 2023 adalah 95% sesuai Inpres 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan capaian PDN seperti belum maksimalnya kebijakan kewajiban penggunaan PDN dalam pengadaan barang jasa di Kabupaten Pesisir Selatan, belum dijadikannya realisasi PDN sebagai salah satu kriteria kinerja perangkat

daerah dan belum maksimalnya peningkatan SDM dalam pengelolaan barang jasa terutama dalam hal penggunaan produk dalam negeri.

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif diantaranya menyebabkan kemiskinan. Kabupaten Pesisir Selatan dalam melihat capaian pengendalian laju inflasi tahun 2023 berpedoman pada tingkat inflasi Kota Padang yaitu 2,55%, sedangkan rata-rata laju inflasi tingkat provinsi Sumatera Barat adalah 2,47%. Hal ini dapat dikategorikan sebagai angka Inflasi yang cukup baik atau ideal. Pemerintah perlu memprioritaskan untuk tetap menjaga tren ini masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya peningkatan inflasi.

5. Penurunan Stunting

Penurunan stunting merupakan bagian RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan. Jumlah balita stunting Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 yaitu 7.21. Penurunan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilakukan diantaranya melalui partisipasi masyarakat dan sangat penting adalah peran pemerintah, karena pemerintah memiliki akses langsung kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak nyata dalam penanganan stunting

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memuaskan Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan

				transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3	A-		Memuaskan dengan Catatan	sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan - 24 - jdih.menpan.go.id No. Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (< 60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
6	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Target tahun 2023 nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah 60,5 dengan realisasi 71,56. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023, termasuk kategori BB, Predikat sangat baik. Untuk memperoleh hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan Evaluasi Internal oleh Evaluator Internal merupakan Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) Kabupaten Pesisir Selatan terhadap RB General dengan 21 (dua puluh satu) Kegiatan Utama dan RB Tematik dengan 4 (empat) tema.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indek reformasi birokrasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa satuan	56 (CC)	58 (CC)	60,5 (B)	56,18 (CC)	58,82 (CC)	71,56 (BB)	100,32 %	101,41 %	118,28 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, ada kenaikan jumlah realisasi Indek Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun dan melebihi target yang ditetapkan, apabila lagi di tahun 2023 naiknya sangat signifikan. Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2021 adalah 56,18 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100,32%, pada tahun 2022 Indek Reformasi Birokrasi 58,82 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 101,41% dan pada tahun 2023 Indek Reformasi Birokrasi 71,56 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 118,28%. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 naik 2,64 dan dari tahun 2022 ke tahun 2023 naik 12,74 ini kenaikan yang sangat signifikan Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Evaluasi Kemen PAN RB terhadap

RB General dan RB Tematik , maka diberikan beberapa Rekomendasi sebagai berikut :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.
 - b. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama.
 - c. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran.
 - d. Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.
2. Agar segera ditetapkan Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja
3. Agar segera ditetapkan peraturan tentang Sistem Kerja untuk penyederhanaan birokrasi
4. Agar menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk meningkatkan Maturitas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Perlu menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA.
6. Perlu Menyusun Renaksi dan Melaksanakan Sosialisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR).
7. Diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dan melampirkan bukti dukung yang lebih relevan untuk meningkatkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan menjadi lebih baik lagi serta melakukan evaluasi untuk beberapa kebijakan yang belum dilakukan evaluasi agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan bermanfaat secara optimal bagi stakeholder terkait dan masyarakat.
8. Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu menjadi baik dan ditingkatkan.
9. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu membuat dasar kebijakan yang tidak hanya mengatur tentang target rilis tapi juga mengatur jadwal rilis dari masing-masing Produsen Data.
10. Tingkatkan pencapaian khususnya untuk pemanfaatan sistem pengadaan dan keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ.
11. Agar menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan Indeks Sistem Merit.
12. Agar menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Laporan Hasil Evaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id
13. Agar menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk peningkatan hasil Survei Penilaian Integritas.

14. Mendorong pelaksanaan SKM pada seluruh UPP.
15. Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik :
 - a. Pengentasan Kemiskinan
 - Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup.
 - Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
 - Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.
 - b. Realisasi Investasi
 - Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah.
 - Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup.
 - Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
 - Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.
 - c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting
 - Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat RB Tematiknya.
 - Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
 - Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.
 - d. Pengendalian Infasi
 - Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual.
 - Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
 - Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.

Dalam rangka mendukung peningkatan pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target sasaran kegiatan utama, untuk memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama, memastikan seluruh Indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran; dan memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.
2. Menetapkan Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja
3. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Meningkatkan hasil Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
 - Mengintruksikan kepada seluruh Kepala OPD agar lebih cermat dalam proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk penguatan penetapan tujuan/sasaran. Indikator target dan strategi (program/kegiatan) yang mendukung pencapaian tujuan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
 - Melakukan rasionalisasi untuk perbaikan perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan serta memenuhi kriteria SMART.
 - Melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang telah diimplementasikan serta mendokumentasikan hasil evaluasi secara tertib sebagai bahan peningkatan kualitas pengendalian yang berkelanjutan.
 - Mengalokasikan sumber daya (utamanya anggaran) yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM terkait pengelolaan risiko pemerintah daerah. Berkoordinasi dengan BPKP untuk pembinaan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
 - Mendorong pelaksanaan proses MR yang efektif dengan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk dalam proses pemantauan risiko dengan menerbitkan laporan pemantauan risiko berkala.
 - Mendorong pelaksanaan proses MR yang efektif dengan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk mengidentifikasi risiko keterjadian fraud pada tingkat strategis pemerintah daerah. Strategis OPD operasional unit kerja.
 - Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APiP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan

kebutuhan SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern.

- Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern.
- Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam penyusunan PPBR; Mengintruksikan kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat dibidang pengelolaan risiko, audit kinerja, dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan, dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP, CRMO, CFrA, dsb.
- APIP agar menyusun dan menetapkan area pengawasan yang menyasar pada sasaran strategis/program prioritas daerah yang bersifat lintas sektoral, serta berbasis prioritas dan risiko; Mengintruksikan kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat dibidang pengelolaan risiko, audit kinerja, dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan, dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP, CRMO, CFrA, dsb.
- Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam menyusun PPBR; dan mengintruksikan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan penilaian kematangan risiko atas register risiko/profil risiko yang disusun oleh seluruh manajemen perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah (risiko strategis, resiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan).
- APIP agar dapat menyusun rencana aksi atas substansi kegiatan konsultasi yang telah dilaksanakan disertai dengan monitoring terhadap implementasi rencana aksi tersebut dan pemanfaatannya oleh stakeholder terkait.
- APIP agar melakukan optimalisasi pemantauan secara berkala terhadap implementasi QAIP sebagaimana telah diatur dalam

- pedoman AAIP maupun pedoman QAIP lainnya yang telah diterbitkan oleh BPKP.
5. Akan membangun unit kerja berintegritas dan melayani pada Instansi Pemerintah.
 6. Meningkatkan hasil Evaluasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :
 - Perencanaan kinerja :
Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan
 - Pengukuran kinerja :
Menetapkan IKU di level Pemerintah Daerah dan PD beserta formulasi perhitungannya sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan kinerja
 - Pelaporan kinerja :
Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :
Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan PD.
 7. Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu menjadi baik dan ditingkatkan.
 8. Mengatur jadwal rilis dari masing-masing Produsen Data.
 9. Selamat atas prestasi yang diraih. Tingkatkan pencapaian khususnya untuk pemanfaatan sistem pengadaan dan keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ.
 10. Meningkatkan Indek Sistem Merit :
 - Melanjutkan penyusunan SKJ untuk seluruh jabatan hingga ke tahap penetapan.
 - Melanjutkan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang terpetakan profil kompetensinya.
 - Memulai pemetaan pegawai ke dalam talent pool dan rencana suksesi sesuai dengan ketentuan nasional.

- Menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai baik metode klasikal maupun nonklasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai.
 - Melakukan promosi ke Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan berdasarkan pada pertimbangan kompetensi (hasil asesmen atau uji kompetensi) dan penilaian kinerja.
 - Mengidentifikasi pegawai dengan kinerja bermasalah dalam pemantauan kinerja, melakukan pembinaan bagi pegawai dengan kinerja bermasalah, serta membangun dan menetapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap hasil pembinaan kinerja tersebut.
11. Menindaklanjuti rekomendasi LHE melalui aplikasi tauval.spbe.go.id
12. Menindaklanjuti rekomendasi Survei Penilaian Integritas :
- Menetapkan Keputusan Bupati tentang manajemen talenta dan Keputusan Bupati tentang pola karir PNS
 - Melakukan perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi.
 - Melaksanakan audit ketaatan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT)
 - Melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - Melakukan perbaikan mendasar dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan implementasi dan internalisasi aturan mengenai sistem merit.
 - Melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.
 - Menetapkan Standar Pelayanan.
13. Melakukan pembinaan untuk mendorong pelaksanaan SKM pada perangkat daerah terkait.
14. Menyempurnakan Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digital Administrasi Pemerintahan serta Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam merencanakan dan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Perangkat Daerahnya masing-masing.
2. Tim RB General maupun RB Tematik memiliki persamaan persepsi dan pemahaman yang sama baik dalam menyusun rencana aksi, melaksanakan, dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi serta dalam melakukan evaluasi internal oleh tim evaluasi internal yang menilai pelaksanaan reformasi birokrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan; dan
3. Ada Asistensi pelaksanaan RB oleh Instansi terkait.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan sasaran peningkatan efektifitas Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Masih kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
2. Keterbatasan sumber daya baik sumber manusia, teknologi maupun keuangan.
3. Masih kurang memperhatikan dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Masih adanya pegawai yang enggan terhadap perubahan sehingga menghambat implementasi Reformasi Birokrasi.
5. Seringnya perubahan regulasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
2. Mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui pendampingan dan bimbingan.
3. Menyusun Rencana Aksi yang targetnya berupa dampak.
4. Mengajak pegawai bertransformasi untuk terus berubah ke arah yang lebih baik.
5. Mengintensifkan koordinasi dengan semua pihak baik antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun dengan Instansi Pemerintah Lainnya, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Indikator ini ditunjang oleh program *Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan target anggaran Rp. 128.918.725,- Dan realisasi sebesar Rp.128.857.713,-*

atau capaian 99,95% berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program *Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* terdapat sisa anggaran sebesar Rp.61.012 atau 0,05 %, karena keterbatasan anggaran, untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka memaksimalkan anggaran yang tersedia.

Adapun prestasi yang di peroleh adalah Piagam Opini BPK dari Tahun 2012-2023, WTP ke 10 Kali.



Penghargaan Digital Government Award dalam bidang penerapan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun 2023



Terbaik I dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk Kategori Kabupaten/Kota terinformatif oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat



Tingkat Kepatuhan Standar Pelayan Publik tahun 2023 yaitu 79.33 Zona Hijau, Kategori B, Kualitas Tinggi



Piagam evaluasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 yaitu 4,33 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .



Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (indikator kinerja), dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,59	72,24	102,34

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia

$$IPM = 1/3 [I \text{ kesehatan} + I \text{ pendidikan} + I \text{ pengeluaran}]$$

$$I \text{ kesehatan} : \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

$$I \text{ pendidikan} : \text{a. } I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

$$\text{b. } I \text{ RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

$$I \text{ pengeluaran} : \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel 3.6. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 102,34%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

Indek Pembangunan Manusia sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks dilakukan melalui proses standarisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. IPM merupakan perwujudan dari tiga aspek pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Aspek umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan standar hidup yang layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indek Pembangunan Manusia tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indek Pembangunan Manusia	Tanpa satuan	71,04	71,22	71,39	70,96	71,25	71,52	99,89	100,04	100,18

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan target 71,39 terealisasi sebesar 71,52, dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun 2022 yaitu target 71,22 realisasi 71,25 dan pada tahun 2021 yaitu target 71,04 realisasi 70,96 khusus untuk tahun 2021 tidak mencapai target, tetapi tahun 2022 dan 2023 melebihi target. Dengan capaian ini artinya kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun meningkat. Ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia adalah :

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan melalui bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
2. Peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan, kepemimpinan, infrastruktur dan proses pembelajaran.
3. Peningkatan fasilitas berusaha serta mengadakan pendidikan dan pelatihan usaha.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia antara lain :

1. Pendistribusian guru yang belum merata dan belum seimbang jumlah guru dengan kebutuhan.
2. Rendahnya lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan di dunia kerja.
3. Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana pendidikan.
4. Belum optimalnya penerapan IPTEK.
5. Belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan.
6. Belum semua Perangkat Daerah mampu mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Disparitas sumber daya kesehatan di daerah dan dinamisasi tata kelola pemerintahan yang akan berdampak terhadap capaian program kesehatan.
8. Belum semua fasilitas kesehatan memenuhi standar.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Meningkatkan angka harapan lama sekolah
2. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah
3. Meningkatkan Usia harapan hidup

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia adalah 3 (tiga) program yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan anggaran Rp.4.013.360.679,- dengan realisasi Rp.2.018.259.700 atau capaian 50,29%. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan anggaran Rp.350.127.250,- dengan realisasi Rp.161.541.250,- atau capaian 46,14%. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan anggaran Rp.231.307.819,- dengan realisasi Rp.222.995.660,- atau capaian 96,41%. Total anggaran dari 3 (tiga) program tersebut adalah Rp.4.594.795.748,- dengan realisasi Rp.2.402.796.610,- atau capaian 52,29% . Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan progam dan kegiatan Tahun 2023 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.2.191.999.138,- atau 47,71%.

Sasaran 3 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Usia Harapan Hidup	tahun	71,39	71,52	100,18

Formulasi capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup

$$\frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

Sumber data : *Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Usia Harapan Hidup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah 71,39 dan terealisasi 71,52 dengan capaian indikator kinerja adalah 100,18%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Pencapaian Usia Harapan Hidup merupakan salah satu keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan hal ini dapat diartikan bahwa salah satu faktor Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan cita-cita salah satu misi serta penunjang terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita visi Bupati mulai terlihat pada tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indek Usia Harapan Hidup tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Usia Harapan Hidup Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup	tahun	71,04	71,22	71,39	70,96	71,25	71,52	99,89	100,04	100,18

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan target 71,39 terealisasi sebesar 71,52, dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun 2022 yaitu target 71,22 realisasi 71,25 dan pada tahun 2021 yaitu target 71,04 realisasi 70,96 khusus untuk tahun 2021 tidak mencapai target, tetapi tahun 2022 dan 2023 melebihi target. Dengan capaian ini artinya kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun meningkat. Ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan jika dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.1
Perbandingan Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Dengan Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Dari grafik diatas, dapat dilihat setiap tahun terjadi peningkatan UHH di Kabupaten Pesisir Selatan, dan angka ini selalu melebihi UHH Provinsi Sumatera Barat. Tetapi angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan UHH Nasional, Karena dari keluaran BPS Pusat, UHH Nasional pada tahun 2023 sudah mencapai 73,93 tahun. Angka tersebut meningkat 0,23 tahun atau 31 % dibandingkan pada tahun sebelumnya(2022) yang sebesar 73,70 tahun. Sementara pada 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 73,37 tahun 73,46 tahun. Penetapan angka Usia Harapan Hidup (UHH) baik di tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat dikeluarkan oleh BPS.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian indikator usia harapan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Melakukan deteksi dini penyakit tidak menular.
2. Melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
3. Meningkatnya akses terhadap pelayanan Kesehatan
4. Memotivasi peran kader dalam meningkatkan Kesehatan ibu dan anak.
5. Adanya komunikasi yang efektif antar puskesmas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan kapasitas petugas dalam pelayanan melalui pelatihan.
7. Meningkatkan peran Masyarakat terhadap Kesehatan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan sasaran Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pola hidup sehat.
2. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

3. Status kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang masih rendah.
4. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
5. Belum meratanya jumlah, jenis dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan.
6. Masih adanya angka stunting.

Peningkatan Usia Harapan Hidup masyarakat Pesisir Selatan akan terus diupayakan melalui upaya berikut ini

1. Membudayakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat.
2. Meningkatkan status kesehatan keluarga
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan upaya promotive dan preventif melalui konseling.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita .
6. Perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan.
7. Pemenuhan dan redistribusi tenaga Kesehatan.
8. Menyusun Regulasi tentang Percepatan Penurunan Stunting
9. Menurunkan prevalensi stunting

Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Sistem Informasi Keluarga.

Keluarga sebagai komponen dari masyarakat berperan signifikan dalam mempengaruhi status kesehatan. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan. Hal ini terkait fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia berdampak terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Meningkatnya UHH saat lahir mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan dimasa yang akan datang. Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual,

ekonomi, dan social. Untuk itu dibutuhkan upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia yang ditujukan agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi.

Dukungan gizi terutama dalam masa tumbuh kembang berpengaruh besar dalam perkembangan anggota keluarga dan masyarakat. Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif. Kurang gizi yang dialami saat awal kehamilan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas, atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Program yang mendukung untuk pencapaian indikator ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 74.567.618.360,- dengan realisasi Rp. 55.923.081.702,- atau capaian 74,99 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.18.644.536.658,- atau 25,00 %. Selain hal tersebut, realisasi anggaran tersebut juga disebabkan oleh keterlambatan Juknis Dana BOK Puskesmas tahun 2023 dan pembatalan pengadaan Cartridge TCM oleh Kemenkes.

Sasaran 4 : Meningkatkan Tingkat Kesejahtera Masyarakat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,9	7,34	94,01
2.	Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/ tahun	9.369.000	9.953.000	106,23
Rata-rata Capaian					100,12

Dari tabel 3.10. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 4 sebesar 100,12%. Pencapaian sasaran strategis 4 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan masih merupakan isu penting bagi Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari yang telah dilakukan sebelum ini. Jika kelompok masyarakat dapat diatasi, maka tujuan Pesisir Selatan bebas dari kemiskinan dalam arti yang sesungguhnya dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan menurunnya tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Kemiskinan	persen	6,9	7,34	93,62

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah 6,90 dan terealisasi 7,34 dengan capaian indikator kinerja adalah 93,62%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan dalam angka, kemiskinan proventy tahun 2023 yaitu 7,34%. Untuk menentukan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, BPS Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan rumus jumlah penduduk yang total konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, di bagi dengan jumlah penduduk keseluruhan, dan kemudian di kali 100. Realisasi tingkat kemiskinan tahun 2023 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator tingkat kemiskinan tercapai < 100%. Pencapaian ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa menekan tingkat kemiskinan. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan realisasi indikator tingkat kemiskinan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tingkat Kemiskinan
Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan	persen	7,55	7,2	6,9	7,92	7,11	7,34	95,33	101,27	93,62

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, ada penurunan tingkat kemiskinan tahun 2021 ke tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi kenaikan. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Melakukan konsolidasi data sasaran penduduk miskin. Proses konsolidasi menyepakati penggunaan Satu Data dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan pada berbagai sektor sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan tepat manfaat.
2. Mengurangi beban pengeluaran adalah guna memastikan setiap sasaran mendapatkan program bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial dan

- program sejenis yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (kurang mampu).
3. Meningkatkan pendapatan keluarga, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin adalah mendorong akses terhadap berbagai program pemberdayaan. Hal ini ditujukan agar kapasitas SDM masyarakat miskin dapat lebih meningkat.
 4. Melakukan Intervensi program terhadap sektor UMKM, karena makin berkembang sektor UMKM serapan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat.
 5. Pemanfaatan program ketahanan pangan pada Pemerintah Nagari yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
 6. Mengurangi kantong kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran indikator Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Belum maksimalnya kolaborasi antar Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melakukan intervensi penurunan tingkat kemiskinan.
2. Keterbatasan sumber daya baik sumber manusia, teknologi maupun keuangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah.
3. Penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan
4. Mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan
5. Dukungan anggaran pengentasan kemiskinan yang masih terbatas

Beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain :

1. Memaksimalkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melakukan intervensi penurunan tingkat kemiskinan.
2. Mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui pendampingan dan bimbingan.
3. menginventarisir dan memvalidasi jumlah masyarakat miskin by name by adres (P3KE).
4. Melakukan penguatan tata kerja TKPKD melalui penyusunan RPKD, RAT Kemiskinan dan RAT Penghapusan kemiskinan ekstrim.
5. Melakukan konsolidasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pengurangan wilayah kemiskinan.
6. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

7. Melakukan fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada Masyarakat,
8. Menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran.

Dalam DPA Tahun 2023, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp.7.168.721.753. Anggaran tersebut terdistribusi ke dalam komponen dan sub komponen dengan bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang ditetapkan pada setiap awal tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut disadari tidaklah mudah, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai bagian dari wujud peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama (stake holders).

Melalui mekanisme evaluasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran, yang berpengaruh pada capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh kondisi keuangan daerah yang menyebabkan perlunya perubahan tersebut. Hal ini dapat dipahami sebagai arah kebijakan untuk melakukan perbaikan, inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja.

Indikator Tingkat Kemiskinan didukung oleh beberapa program dan Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp2.401.292.342 dan terealisasi sebesar Rp.2.261.887.640 dengan rincian program yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan target anggaran Rp.331.632.526 dan realisasi sebesar Rp.284.953.489 atau capaian 85,92%.
2. Program Penanganan Bencana dengan target anggaran Rp.304.290.275 dan realisasi sebesar Rp.250.396.102 atau capaian 82,28%.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target anggaran Rp.288.352.978 dan realisasi sebesar Rp.265.085.810 atau capaian 91,93%.

4. Program Pemberdayaan Sosial dengan target anggaran Rp.1.477.016.563 dan realisasi sebesar Rp.1.461.452.239 atau capaian 98,94%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung indikator Tingkat Kemiskinan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.139.404.702 atau 5,80%.

Adapun prestasi yang di peroleh adalah Juara 1 Kualifikasi Informatif selaku Badan Publik Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.



Selain itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperoleh penghargaan Nilai Tertinggi Kedua Pelayanan Publik dari Ombudsman RI Tahun 2023 yang diterima tanggal 4 Maret 2024.

2. Pengeluaran Per kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang

berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan menurunnya tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran yang harus dicapai untuk meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9.369.000	9.953.000	106,23

Formulasi capaian indikator kinerja Pengeluaran Perkapita

$$Y^* = \frac{Y}{TAK} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Pengeluaran Perkapita Tahun 2023 :	$\frac{Rp.9.369.000}{Rp.9.953.000} \times 100\% = 106,23\%$
--	---

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2023 ditargetkan Rp. 9,369,000 dan terealisasi sebesar Rp. 9,953,000 dengan capaian kinerja sebesar 106,23%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Seiring dengan bertambahnya pendapatan dapat mendorong kemampuan daya beli yang akan menstimulasi peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi pokok yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bahan pangan. Harga bahan pangan dipengaruhi ketersediaan barang atau keseimbangan tingkat permintaan dan penawaran. Bila terjadi kesenjangan antara tingkat permintaan dan penawaran maka akan mengakibatkan inflasi harga barang. Semakin tinggi kesenjangan maka akan semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan akan berakibat pada bertambahnya pengeluaran masyarakat untuk memberi barang-barang yang dibutuhkannya. Konsumsi merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Perbandingan realisasi indikator Pengeluaran per Kapita tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Pengeluaran per Kapita
Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pengeluaran per Kapita	Rp./ orang/ tahun	9.212.000	9.325.000	9.369.000	9.270.000	9.686.000	9.953.000	100,63	103,87	106,23

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, ada peningkatan Pengeluaran per Kapita tahun 2021 ke tahun 2023. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Beberapa faktor mendorong pengeluaran per kapita adalah :

1. Bertambahnya pendapatan masyarakat.
2. Meningkatnya kebutuhan masyarakat.
3. Stabilitasnya inflasi menguatkan daya beli masyarakat hingga ekonomi berputar dinamis.
4. Membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mendorong pengeluaran per kapita antara lain :

1. Kurangnya lapangan kerja.

2. Kurangnya sumber daya yang berkualitas.
3. Kurangnya adaptasi teknologi.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran per kapita antara lain :

1. Menciptakan lapangan kerja baru.
2. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan.

Indikator Pengeluaran per Kapita ditunjang oleh beberapa program untuk mendukung pencapaian Sasaran Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Anggaran untuk mendukung sasaran ini yaitu program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan Gedung, program penataan bangunan dan lingkungannya, program penyelenggaraan jalan, program pengembangan jasa konstruksi, program penyelenggaraan penataan ruang, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi social, program perlindungan dan jaminan social, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b), program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup, program pengelolaan persampahan, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengembangan kawasan transmigrasi, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program perekonomian dan pembangunan, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan target anggaran Rp.201.586.391.411,- dan realisasi sebesar Rp.193.877.126.969,- atau capaian 96,18 % berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa

dalam pelaksanaan program untuk mendukung capaian sasaran tersebut terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.7.709.264.442,- atau 3,82%.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutann

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 terdiri dari 3 (indikator kinerja), dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.15
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,65	5,14	110,54
2.	Nilai PDRB	Triliyun Rupiah	10,409	10,183*	97,83
3.	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,259	103,60
Rata-rata Capaian					103,99

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2022
Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Dari tabel 3.15. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 5 sebesar 103,99%. Pencapaian sasaran strategis 5 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan kondisi perekonomian suatu daerah ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kapasitas daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa. Indikator yang mengukur kapasitas ekonomi tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika kapasitas tersebut meningkat yang berarti secara riil jumlah produksi barang dan jasa meningkat akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi positif. Pada tahun 2023, nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yaitu masing- masing Rp. Mencapai Rp. 10.608,29 Miliar dan atas dasar harga konstan 2022 mencapai Rp. 10.181,47 miliar. Berdasarkan capaian tersebut, perekonomian Pesisir Selatan tumbuh positif atau mengalami peningkatan sebesar 4,19%. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran yang harus dicapai untuk meningkatnya

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,65	5,14	110,54

Formulasi capaian indikator kinerja Pertumbuhan ekonomi

$$\frac{\text{PDRB}(t-1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t-1)} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Pengeluaran Perkapita Tahun 2023 :	$\frac{\text{Rp.9.369.000}}{\text{Rp.9.953.000}} \times 100\% = 106,23\%$
--	---

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 ditargetkan 4,65 dan terealisasi 5,14 dengan capaian kinerja sebesar 110,54%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Tingkat konsumsi masyarakat akan turut menentukan kecepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan. Hal yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi harus berimbangan dengan terciptanya pemerataan pendapatan

Perbandingan realisasi indikator Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	persen	2,55	2,89	4,65	3,37	4,02	5,14	132,15	139,10	110,54

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, ada peningkatan Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ke tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan, meskipun demikian capaiannya masih di atas target. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Menurunkan jumlah penduduk miskin.
3. Meningkatkan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Memperkuat infrastruktur untuk membangun ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi antara lain :

1. Kurangnya pertumbuhan lapangan usaha.
2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia sehingga produktifitas hasil rendah.
3. Kurangnya kemampuan terhadap teknologi.
4. Masih ada regulasi atau implementasi regulasi yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi antara lain :

1. Penciptaan dan pengembangan lapangan usaha.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan.
3. Memberikan pengetahuan tentang teknologi dan memanfaatkannya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
4. Pemerintah harus terus berupaya untuk menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi ditunjang oleh beberapa program untuk mendukung pencapaian Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi secara berkelanjutan. Anggaran untuk mendukung sasaran ini yaitu program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), program pengelolaan pelayaran, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengelolaan sistem informasi industri nasional, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program penyuluhan pertanian dan program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) dengan target anggaran Rp.78.050.562.231.- dan realisasi sebesar Rp.71.964.970.799 atau capaian 92,20% berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program untuk mendukung capaian sasaran tersebut terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.6.085.591.432 atau 7,80 %.

2. Nilai PDRB (ADHK)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebuah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi, dan nilai ini biasanya dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Target tahun 2023 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Selatan adalah 10,409 dengan realisasi 10,103* (Data Realisasi 2022) karena sampai dengan Laporan ini disusun, data dari BPS belum rilis, berdasarkan koordinasi dengan BPS dapat dipergunakan data 2022. Berdasarkan realisasi dari data tersebut menunjukkan bahwa capaian PDRB Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023, termasuk Predikat

sangat baik, berikut tabel 3.18 realisasi dan Capaian Indikator Kinerja PDRB Tahun 2023.

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja PDRB
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai PDRB (ADHK)	Triliyun Rupiah	10,409	10,183*	97,83

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Formulasi capaian indikator kinerja Nilai PDRB (ADHK)

Jumlah PDRB ADHK pada tahun berjalan

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah 10,409 dan terealisasi 10,183* dengan capaian indikator kinerja adalah 97,83%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai PDRB (ADHK) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.19 di bawah ini.

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB
(ADHK) Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai PDRB (ADHK)	Triliyun Rupiah	9,711	9,992	10,409	9,79	10,183	10,183*	100,81	101,91	97,83

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, ada kenaikan jumlah realisasi Nilai PDRB (ADHK) dari tahun 2021 mengalami kenaikan, tetapi untuk capaian tahun 2023 masih memakai data tahun 2022 karena sampai dengan Laporan ini disusun data dari BPS belum rilis, Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

1. **Faktor Peningkatan Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan** Pertanian merupakan salah satu sektor paling berpengaruh di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbukti dengan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan yang paling tinggi yaitu di angka 28,47 persen pada Tahun 2022. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian



adalah tanaman pangan kemudian disusul oleh perkebunan tahunan, peternakan, tanaman hortikultura

tahunan dan lainnya, tanaman hortikultura semusim, jasa pertanian dan perburuan. Tingginya kontribusi tanaman pangan dan perkebunan tahunan tidak lain disebabkan oleh komoditas padi, jagung dan kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian nilai PDRB sektor pertanian tidak terlepas dari capaian produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 s.d Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3,20 dibawah ini :

Tabel 3.20
Capaian Produksi Pertanian di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2022-2023

NO	KOMODITI	SATUAN	2022	2023
1	Padi	Ton	161.639	201.336
2	Jagung	Ton	208.011	142.640
3	Cabe Merah	Ton	5.042	4.977
4	Bawang Merah	Ton	146	293
5	Durian	Ton	18.482	23.897
6	Manggis	Ton	4.695	3.374
7	Jeruk	Ton	4.465	12.728
8	Jengkol	Ton	5.747	11.081
9	Kelapa Sawit	Ton	79.850	77.352
10	Kelapa Dalam	Ton	3.154	3.509
11	Kopi	Ton	2.373	2.506
12	Gambir	Ton	5.944	5.668
13	Pala	Ton	912	1.005
14	Daging Sapi	Ton	1.811	1.687
15	Daging Kerbau	Ton	63	53
16	Daging Kambing	Ton	36	36
17	Daging Ayam	Ton	4.607	2.973
18	Daging Itik	Ton	128	299
19	Telur Ayam	Ton	1.199	920
20	Telur Itik	Ton	1.197	2.790
Jumlah		Ton	509.500	499.123

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023, diolah

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Beberapa komoditi yang mengalami peningkatan mulai dari yang terbesar yaitu padi diikuti jeruk, durian, jengkol dan telur itik. Komoditi yang mengalami penurunan yang terbesar adalah jagung diikuti kelapa sawit dan daging ayam. Naik dan turunnya produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Luas Lahan

Luas lahan merupakan poin penting terhadap produksi komoditas pertanian. Secara umum, luas lahan berbanding lurus dengan produksi sehingga untuk meningkatkan produksi maka langkah konsevatif yang diambil adalah memperluas lahan, namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, lahan pertanian mulai tergeser dengan lahan pemukiman sehingga produksi pertanian pun terganggu. Pada Tabel 3.21 dibawah ini dapat dilihat luas lahan sawah per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.21
Luas Lahan Sawah per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Irigasi (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Pasang Surut (Ha)	Lebak (Ha)	Jumlah (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Silaut	-	-	-	-	-
2	Lunang	681	610,41	-	-	1.291,41
3	BAB Tapan	1.020,89	129	-	-	1.149,89
4	Rahul Tapan	721,30	18	-	-	739,30
5	Pancung Soal	1.399,65	51	-	-	1.450,65
6	Airpura	819,89	-	32	-	851,89
7	Linggo Sari Baganti	773	1.727,54	-	-	2.500,54
8	Ranah Pesisir	1.495	1.092,11	-	-	2.587,11
9	Lengayang	2.597,58	300	-	33	2.930,58
10	Sutera	1.828	866,91	7	19	2.720,91

11	Batang Kapas	1.439	282,89	-	-	1.721,89
12	IV Jurai	1.360,67	37	-	-	1.397,67
13	Bayang	1.628,19	478	-	-	2.106,19
14	Bayang Utara	398	72,31	-	-	470,31
15	Koto XI Tarusan	1.139,75	827	-	-	1.966,75
Jumlah		17.301,92	6.492,17	39	52	23.885,09

Sumber : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023, diolah

Pada Tahun 2023, luas tanam padi berada pada kisaran 39.482,92 Ha. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 1,73 persen.

2. Produktivitas Tanaman

Menurut FAO (*Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa*) Produktivitas tanaman adalah ukuran dari jumlah hasil yang dihasilkan oleh tanaman tertentu dalam satuan luas tanah atau per unit input tertentu, seperti air, pupuk, atau tenaga kerja, dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana tanaman dapat menghasilkan hasil yang optimal.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanaman:

a) Faktor Internal

Genetika Tanaman: Genetika tanaman adalah faktor internal yang paling mendasar. Varietas atau jenis tanaman yang digunakan akan memiliki karakteristik genetik tertentu yang memengaruhi produktivitasnya, seperti resistensi terhadap penyakit, ukuran hasil, dan potensi pertumbuhan.

Umur Tanaman: Siklus hidup tanaman, termasuk fase pertumbuhan, berbunga, dan berbuah, memengaruhi jumlah hasil yang dapat dihasilkan. Tanaman yang memiliki siklus pendek mungkin lebih produktif karena dapat ditanam lebih sering dalam satu tahun.

Kesehatan Tanaman: Kesehatan tanaman, termasuk kebebasan dari penyakit dan serangga, sangat penting untuk produktivitas. Tanaman yang sehat cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik.

Nutrisi Tanaman: Ketersediaan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam tanah dapat memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pemberian pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas.

Kerapatan Tanaman: Jarak antara tanaman (kerapatan tanam) dapat memengaruhi kompetisi untuk sumber daya seperti air, cahaya matahari, dan nutrisi. Kerapatan yang optimal perlu dipertimbangkan untuk mencapai produktivitas maksimum.

b) Faktor Eksternal

Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cuaca, suhu, curah hujan, dan kelembaban udara memiliki dampak besar pada produktivitas tanaman. Tanaman yang tumbuh dalam kondisi lingkungan yang sesuai akan lebih produktif.

Tanah: Kualitas tanah, termasuk tekstur, struktur, pH, dan kandungan bahan organik, mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi. Tanah yang subur dan sehat mendukung produktivitas yang lebih tinggi.

Manajemen Pertanian: Cara tanaman dikelola, termasuk pemilihan varietas yang tepat, penggunaan pupuk dan pestisida, serta praktik irigasi dan pemeliharaan, berdampak besar pada produktivitas. Manajemen yang baik dapat meningkatkan hasil.

Pestisida dan Penyakit: Serangan hama dan penyakit dapat merusak tanaman dan mengurangi produktivitas. Kontrol hama dan penyakit yang efektif diperlukan untuk menjaga produktivitas tanaman.

Teknologi Pertanian: Penggunaan teknologi modern seperti irigasi berbasis sensor, pemantauan pertanian berbasis data, dan pemilihan varietas unggul dapat meningkatkan produktivitas tanaman.

Upaya Peningkatan Produktivitas Tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Berikut adalah beberapa upaya peningkatan produktivitas tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan:

1) Pemilihan Varietas Unggul

Memilih varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, seperti ketahanan terhadap penyakit, adaptabilitas terhadap kondisi lingkungan, dan hasil yang tinggi, dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Varietas Unggul Nasional yang sudah dilepaskan oleh Kementerian Pertanian RI yaitu :

a) Varietas Unggul Padi Sawah Bawaan

Varietas ini dilepaskan pada Tahun 2011, kegiatan perbanyak benih dasar sampai benih sebenarnya ini setiap tahun dilakukan. Permintaan benih padi sawah varietas Bawaan setiap tahun terus meningkat baik itu petani yang berada dalam Kabupaten Pesisir Selatan maupun Kabupaten/Kota yang lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas-aktivitas perbanyak benih dasar padi sawah varietas Bawaan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :





Gambar 3.2 : Kegiatan perbanyak Benih Dasar Padi Sawah Varietas Bawaan

- b) Varietas Unggul Jengkol yaitu Jengkol Lokan Pessel dan Jengkol Bareh Pessel
Varietas jengkol ini telah dilepaskan oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2018. Pohon Induk Tunggal (PIT) jengkol ini berada di Kecamatan Airpura yang dimiliki oleh Petani yang bernama Amir, jengkol Lokan Pessel ada 1 (satu) batang pohon induk dan Bareh Pessel ada 2 (dua) batang pohon induk. Setiap tahun pemeliharaan pohon induk tunggal selalu dianggarkan dalam APBD Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain aktivitas perbanyak dan pemeliharaan varietas unggul tersebut diatas, untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman yang lainnya adalah kegiatan penyaluran bantuan benih/bibit tanaman ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan baik itu tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Pada Tabel 3,22 dibawah ini dapat dilihat jumlah bantuan benih/bibit tanaman yang telah disalurkan ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan baik itu sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.22
Jumlah Bantuan Benih/Bibit Tanaman Yang Telah Disalurkan Ke Kelompok Tani Se Kabupaten Pesisir Selatan Baik Itu Sumber Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi Maupun APBN Tahun 2023

No	Sarana yang Diberikan	Volume	Satuan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi Sawah Inbrida	3.000	Ha	
2	Bawang Merah	3	Ha	
3	Cabe Merah	16	Ha	
4	Manggis (Kampung Buah)	50	Ha	
5	Manggis (Ekstensifikasi Kawasan Buah)	2	Paket	
6	Kelapa Dalam	14.000	Batang	
7	Pala	10.000	Batang	
8	Pinang	122.010	Batang	
9	Cengkeh	16.800	Batang	
10	Kopi	14.580	Batang	
11	Kelapa Sawit	2.750	Batang	

Sumber : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan, Tahun 2023

Aktivitas-aktivitas penyaluran benih tanaman dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.3 : Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

- 2) Pemberian Pupuk yang Tepat
Menerapkan pemupukan yang tepat berdasarkan analisis tanah dan kebutuhan tanaman dapat memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang baik.
- 3) Pengelolaan Tanah yang Baik
Menerapkan praktik-praktik pengolahan tanah yang optimal, penanaman penutup tanah, dan penggunaan bahan organik dapat meningkatkan struktur tanah dan ketersediaan nutrisi.



Gambar 3.4 : Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani dalam rangka peningkatan kualitas pengolahan tanah untuk budidaya pertanian

- 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Irigasi Tersier
Air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu

program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit baik itu dana yang bersumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, DAK Fisik Bidang Pertanian maupun APBN. Aktivitas-aktivitas rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.5 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Sumber Dana DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023

Selain rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemenuhan akan air terhadap petani juga melalui pemberian bantuan pompa air terutama sawah-sawah tadah hujan. Selama Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pertanian telah menyalurkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit pompa air 3 inchi. Aktivitas-aktivitas penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.6 : Penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan.

- 5) Pengendalian Hama dan Penyakit
Menggunakan teknik pengendalian hama dan penyakit yang efektif, termasuk pemilihan varietas tahan penyakit dan pemantauan teratur, dapat mencegah kerugian hasil yang signifikan.
- 6) Praktik Penanaman yang Tepat
Mengatur jarak tanam yang sesuai, kedalaman penanaman, dan waktu tanam berdasarkan pada varietas dan kondisi lingkungan adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas. Salah satu teknologi budidaya yang dipakai petani di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sistem tanam “Jajar Legowo”. sistem jajar legowo ada beberapa jenis yang biasa diterapkan oleh petani di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “Jajar Legowo 2:1, 3:1 dan 4:1”. Berdasarkan hasil yang didapatkan jajar legowo 2:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 33 persen, jajar legowo 3:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 25 persen dan jajar legowo 4:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 18 persen. Aktivitas penanaman jajar legowo di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat seperti Gambar dibawah ini :



Gambar 3.7 : Penanaman sistem Jajar Legowo 2:1 (sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (sebelah kanan)

7) Pemangkasan

Pemangkasan tanaman dengan benar dapat merangsang pertumbuhan tunas baru, memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari, dan meningkatkan hasil tanaman yang dibudidayakan. Aktivitas pemangkasan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.8 : Pemangkasan tanaman upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

8) Penggunaan Teknologi Pertanian

Menerapkan teknologi modern seperti pemantauan berbasis data, aplikasi mobile, dan sistem irigasi otomatis dapat membantu meningkatkan manajemen pertanian dan mengoptimalkan produktivitas. Aktivitas penggunaan drone dalam pemantauan berbasis data terhadap luas tanam tanaman pangan seperti Gambar dibawah ini :



Gambar 3.9 : Pemantauan luas tanam padi sawah menggunakan drone (pengadaan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023)

- 9) Perlindungan Terhadap Cuaca Ekstrem
Menyediakan perlindungan fisik, seperti rumah kaca atau jeruji, dapat membantu melindungi tanaman dari cuaca ekstrem, yang dapat merusak hasil.

10) Pelatihan dan Pendidikan

Memastikan bahwa petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam manajemen pertanian yang efektif sangat penting. Pelatihan dan pendidikan pertanian dapat membantu dalam menerapkan teknik-teknik yang benar. Aktivitas peningkatan kapasitas petugas dan petani/kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.10 : Pendidikan dan pelatihan petugas serta pembinaan kelompok tani Tahun 2023

3. Peningkatan Populasi Ternak

Peningkatan produksi peternakan baik itu daging maupun telur salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan jumlah populasi ternak. Upaya peningkatan populasi ternak yang dilakukan adalah pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) oleh tenaga Inseminator dimana target setiap tahunnya sebanyak 10.000 straw dan penyaluran bantuan ternak ke Kelompok Tani. Pada Tabel 3.23 dibawah ini dapat dilihat jumlah ternak yang disalurkan ke Kelompok Tani Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.23
Jumlah Ternak Yang Disalurkan Ke Kelompok Tani Tahun 2023

No	Jenis Ternak	Volume	Satuan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Itik	11.500	Ekor	
2	Ayam Buras	19.000	Ekor	
3	Sapi	9	Ekor	
4	Kambing	150	Ekor	

Sumber : Bidang Peternakan Tahun 2023, diolah

Aktivitas Inseminasi Buatan oleh Inseminator dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :





Gambar 3.11 : Aktivitas peningkatan populasi ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2023

Hasil Inseminasi Buatan (IB) dapat dilihat pada Gambar dibawah ini



Gambar 3,12 : Hasil Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2023

Aktivitas penyaluran ternak ke Kelompok Tani dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.13 : Penyaluran ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Indikator ini ditunjang oleh program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian dengan target anggaran Rp. 31.133.179.306 dan realisasi sebesar Rp. 27.449.088.362 atau capaian 88,17 persen.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.684.090.944 atau sebesar 11,83 persen.

Kendala Dalam Pembangunan Sektor Pertanian

1. Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
2. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.
 - a) Prasarana.

Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan basis teknologi modern menjadi kunci sukses dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
 - b) Sarana.

Penggunaan alat mesin pertanian harus kita lakukan untuk mempercepat pengolahan tanah dan panen sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman dan produksi.
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani/peternak.
4. Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Pertanian.

5. Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Lahan dan Air.
6. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan.
7. Masih Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas.
8. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani.
9. Berkurangnya Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan.
10. Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian.
11. Rendahnya Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian.
12. Masih Tingginya Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen.
13. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.
14. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber daya genetik hewan.
15. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul.
16. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan.

Upaya Mengatasi Permasalahan Pembangunan Sektor Pertanian

1. Meningkatkan Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian
3. Meningkatkan pendapatan petani/peternak.
4. Optimalisasi Produktivitas Pertanian.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan.
6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas.
7. Optimalisasi Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani.
8. Perlindungan Lahan Pertanian dari Alih Fungsi Lahan.
9. Peningkatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian.
10. Meningkatkan Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian.
11. Menurunkan Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen.
12. Meningkatkan nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.
13. Optimalisasi Pelestarian Sumber daya genetik hewan.
14. Meningkatkan kebutuhan benih ternak unggul.

15. Optimalisasi penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan.

Dalam DPA Tahun 2023, Dinas Pertanian memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian sebesar **Rp 44.098.790.126,00**. Anggaran tersebut terdistribusi ke dalam komponen dan sub komponen dengan bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi penyediaan sarana prasarana pertanian serta perencanaannya, peningkatan sumber daya manusia bagi petugas/petani/kelompok tani.

Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pertanian selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang ditetapkan pada setiap awal tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut disadari tidaklah mudah, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai bagian dari wujud peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama (stake holders).

Melalui mekanisme evaluasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran, yang berpengaruh pada capaian kinerja Dinas Pertanian. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh kondisi keuangan daerah yang menyebabkan perlunya perubahan tersebut. Hal ini dapat dipahami sebagai arah kebijakan untuk melakukan perbaikan, inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja.

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian ditunjang oleh program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 17.489.361.471,00 realisasi sebesar Rp. 16.581.282.164,00 atau sebesar 94,81% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 908.079.307,00 atau 5,19%.

Indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian ditunjang oleh program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 91.833.857,00 realisasi sebesar Rp. 68.419.600,00 atau sebesar 74,50% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 23.414.257,00 atau 25,50%

Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) ditunjang oleh beberapa program yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target anggaran sebesar Rp. 10.755.075.168,00 realisasi sebesar Rp.

- 9.882.545.112,00 atau sebesar 91,89% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 872.530.056,00 atau 8,11%.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target anggaran sebesar Rp. 11.143.360.980,00 realisasi sebesar Rp. 9.069.354.355,00 atau sebesar 81,39% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.074.006.625,00 atau 18,61%.
 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan target anggaran sebesar Rp. 231.307.819,00 realisasi sebesar Rp. 222.995.660,00 atau sebesar 96,41% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.312.159,00 atau 3,59%.
 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target anggaran sebesar Rp. 259.990.000,00 realisasi sebesar Rp. 243.189.450,00 atau 93,54% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 16.800.550,00 atau 6,46%.
 5. Program Penyuluhan Pertanian dengan target anggaran sebesar Rp. 8.743.445.339,00 realisasi sebesar Rp. 8.031.003.785,00 atau 91,85% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 712.441.554,00 atau 8,15%
- Pagu secara keseluruhan indikator ini sebesar Rp. 31.133.179.306,00 realisasi Rp. 27.449.088.362,00 atau 88,17% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.684.090.944,00 atau 9,47%.

Piagam penghargaan yang diterima selama Tahun 2023



No	Kriteria	Bulan/Tahun	Peringkat	Tingkat	Pemberi Penghargaan
1	Sapi Pesisir Jantan	Juni 2023	I	Provinsi	Pemda Prov. Sumbar
2	Sapi Pesisir Betina	Juni 2023	II	Provinsi	Pemda Prov. Sumbar

3	Sapi PO Betina	Juni 2023	II	Provinsi	Pemda Prov. Sumbar
---	----------------	-----------	----	----------	--------------------

Produksi Ikan

Produksi perikanan terjadi peningkatan dari target tahun 2022 dibandingkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu dari 48.977 Ton menjadi 50.185 Ton atau mengalami peningkatan sebesar 102,5 %. Peningkatan produksi perikanan ini dikarenakan meningkatnya jumlah tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan dan bantuan alat penangkapan seperti Perahu Jukung, Mesin tempel dan long tail, Alat tangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan baik bersumber APBD, APBD Provinsi dan DAK. Produksi Perikanan ini didukung oleh Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya.

a. Produksi Perikanan Tangkap

Pada tahun 2021 realisasi produksi perikanan tangkap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 35.549 ton atau dengan capaian 100 %. Sedangkan untuk tahun 2022 capaian produksi perikanan tangkap meningkat 100,50 % dari target yaitu 35.727 ton dengan realisasi 35.907 ton. Dan pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu 162,66 % dari target tahun 2023 sebesar 35.906 ton dengan realisasi sebesar 58.405 ton :

Tabel 3.24
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap tahun 2021-2023

Uraian	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Produksi Perikanan Tangkap	ton	35.549	35.727	35.906	35.549	35.907	58.405	100,00	100,50	162,66

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, ada kenaikan realisasi Produksi Perikanan Tangkap dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

b. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya dua tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 target produksi perikanan budidaya adalah 12.618 ton dan realisasi produksi 14.092 ton dengan capaian 111,68%. Dan tahun 2022 target produksi perikanan budidaya adalah 13.250 ton dan realisasi produksi 14.278 ton dengan

capaian 107,76%. Untuk tahun 2023 produksi budidaya Kembali meningkat dari target 13.913 ton menjadi 14.490 ton dengan capaian 104,15 %. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang sudah mulai berusaha budidaya ikan di air tawar dengan membuat kolam baik swadaya maupun berkelompok. Disamping itu bantuan benih ikan dan pakan sudah dibantu oleh pemerintah (BBI).

Tabel 3.25
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya tahun 2021-2023

Uraian	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Produksi Perikanan Budidaya	ton	12.618	13.250	13.913	14.092	14.278	14.490	111,68	107,76	104.15

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, ada kenaikan realisasi Produksi Perikanan Budidaya dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

Faktor Keberhasilan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya.

1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar
2. Dukungan anggaran dalam kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan
3. Peran serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi perikanan yang telah terbentuk yang partisipasi aktif dalam pembangunan perikanan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya antara lain :

1. Terjadinya inflasi.
2. Sebagian nelayan masih menggunakan perahu tanpa motor dan sebagian masih menggunakan perahu mesin tempel
3. Sarana dan prasarana penangkapan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya
4. Pangkalan Pendaratan Ikan belum tersedia secara representative
5. Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan
6. Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum maupun lahan pesisir masih belum optimal.
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap

8. Adanya bantuan hibah yang diberikan kepada kelompok.
9. Kurangnya modal untuk membudidayakan ikan
10. Kurangnya akses pembudidaya terhadap lembaga permodalan.
11. Kurangnya inovasi dalam intensifikasi dan diversifikasi produk budidaya perikanan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya antara lain :

1. Peningkatan jumlah perahu bermotor untuk kegiatan penangkapan ikan
2. Peningkatan modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi perikanan tangkap
3. Penyampaian dan pemberian akses permodalan melalui perbankan dan koperasi
4. Perlunya pembinaan dan pendampingan yang bersinergi dari PPL dan PB, Dinas Perikanan dan pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Camat, wali nagari
5. Perlunya penggunaan benih ikan berkualitas yang digunakan pembudidaya.
6. Verifikasi yang tajam kepada penerima bantuan.

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan

Industri Pengolahan merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. PDRB sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, sedangkan PDRB sektor Industri Pengolahan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sektor pengolahan. Sedangkan Indikator Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan diformulasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan PDRB Sektor Industri Pengolahan sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara berkelanjutan, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.26 berikut ini:

Tabel 3.26
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB Sektor Industri pengolahan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)

1.	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Milyar Rp.	717,93	759,55	105,80
----	---------------------------------------	------------	--------	--------	--------

Formulasi capaian indikator kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan

Jumlah PDRB dari sektor industri pengolahan berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Lingkup Industri pengolahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Industri Kecil Menengah /IKM (UMK sektor pengolahan menurut UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sedangkan Industri Besar (Usaha Menengah dan Besar menurut UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) merupakan tanggung jawab Provinsi, lingkup tanggung jawab Pemerintah Kabupaten hanya pengawasan.

Berikut Data Dukung Pencapaian Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan

Tabel 3.27
Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.	Jumlah IKM	3.879	4.971	5.037
2.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	11.879	13.797	14.087
3.	Nilai Investasi (Rp.000)	127.583.320	145.385.535	146.649.535
4.	Nilai Produksi (Rp.000)	441.090.629	462.181.592	472.058.642
5.	Nilai Bahan Baku (Rp.000)	236.799.132	253.239.031	259.709.611
6.	Omset (Rp.)	532.850.652	576.726.784	594.052.634

Tabel 3.28
Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah per Cabang Industri
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023

NO	KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH IKM		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5

1	INDUSTRI MAKANAN	1.551	1.723	1.744
2	INDUSTRI MINUMAN	140	142	146
1	2	3	4	5
3	INDUSTRI PENGOLAHAN TEBKAU	-	-	-
4	INDUSTRI TEKSTIL	134	120	120
5	INDUSTRI PAKAIAN JADI	277	310	313
6	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	11	12	12
7	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	112	158	158
8	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	-	-	-
9	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	17	17	17
10	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	-	0	-
11	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA	560	1357	1.391
12	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	4	4	4
13	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	3	3	3
14	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	322	339	339
15	INDUSTRI LOGAM DASAR	-	0	-
16	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA	137	156	157

17	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK	-	0	-
18	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK	-	0	-
1	2	3	4	5
19	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL	4	5	5
20	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER	17	17	17
21	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA	21	20	20
22	INDUSTRI FURNITUR	489	518	518
23	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	80	70	73
24	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	-	0	-
	JUMLAH	3.879	4.971	5.037

Pada tahun 2023, bentuk intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan, adalah sebagai berikut :

A. Pengembangan Sumber Daya Industri

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

a. Penunjang Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan

Agenda Dekranasda yang dilaksanakan pada tahun 2023, terdiri dari Pameran Inacraft tahun 2023 di JCC dan Minangkabau Fashion Heritage di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Lomba Desain Busana Muslimah di Padang, Temu Bisnis IKM Kerajinan di Padang, Lomba desain busana Batik Minang di Kota Sawahlunto, Pameran Industri PEDATI XIII di Bukittinggi serta pembinaan langsung ke IKM Batik Jembatan Akar di Nagari Puluik Puluik Bayang Utara.



Gambar 3.14 : Pameran Inacraft tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC)



Gambar 3.15 : Minangkabau Fashion Heritage 2023 di JCC



Gambar 3.16 : Lomba Desain Busana Muslimah di Padang



Gambar 3.17 : Lomba desain busana Batik Minang di Kota Sawahlunto

B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

- a. Bantuan Mesin Jahit kepada Kelompok IKM Menjahit Bunga Tanjung di Kecamatan Koto XI Tarusan

- b. Bantuan Mesin Pengolahan Sirup Pala kepada Kelompok IKM Sirup Pala Bundo Sakato di Kecamatan Linggo Sari Baganti
 - c. Pelatihan Teknis dan Kewirausahaan kepada Kelompok IKM Menjahit Bunga Tanjung di Kecamatan Koto XI Tarusan
- C. Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :
- a. Pembangunan Sentra IKM Gambir di Kecamatan Sutera (DAK Fisik). Berikut alokasi anggaran DAK Fisik Kementerian Perindustrian tahun 2023 :
 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sentra IKM Pengolahan Gambir
 - Pengadaan Mesin dan Peralatan



Gambar 3.18 : Dokumentasi Pembangunan Sentra IKM Gambir di Kecamatan Sutera

- b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM/ PK2SIKM (DAK Non Fisik)
Program PK2SIKM terdiri atas beberapa 4 menu kegiatan dan 17 (tujuh belas) pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan di 3 (tiga) lokasi Sentra IKM yaitu Sentra IKM

Perikanan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Sentra IKM Minyak Atsiri di Kecamatan Lunang dan Sentra IKM Gambir di Kecamatan Sutera. Dengan menu kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Dan Daya Saing IKM
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM

3. Pengembangan Kemitraan IKM
 4. Pelatihan dan Kemitraan Berorientasi Ekspor
- c. Fasilitasi Legalitas produk : Sertifikasi Halal dan TKDN (DAK Non Fisik)
Berikut data Fasilitasi legalitas produk tahun 2023 :

Tabel 3.29
Rekapitulasi Fasilitasi Legalitas Produk IKM pada tahun 2021-2023

No	Jenis Legalitasi produk	Izin yang difasilitasi tahun -		
		2021	2022	2023
1	MD-BPOM	1	2	0
2	Sertifikat Halal	8	4	231
3	Pendaftaran Merek (HKI)	4	15	0
4	Sertifikat TKDN	0	0	90
	Total Legalitas Produk	13	21	321

Tabel 3.30
Rekapitulasi Legalitas Produk IKM yang terbit pada tahun 2021-2023

No	Jenis Izin	Jumlah Izin yang diterbitkan tahun -		
		2021	2022	2023
1	MD-BPOM	1	1	0
2	Sertifikat Halal	8	4	58
3	Pendaftaran Merek (HKI)	4	11	0
4	Sertifikat TKDN	0	0	39
	Total Legalitas Produk	13	16	97

- d. Rehab Sentra IKM Minyak Atsiri (DAU-APBD)

Rehab sentra IKM Minyak atsiri terdiri dari Pembuatan Pagar dan Penyimpanan Air Sentra IKM Minyak Atsiri



Gambar 3.19 : Rehab Sentra IKM Minyak Atsiri**e. Perencanaan Pembangunan Sentra IKM Gambir Tahap 2 tahun 2024**

Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mendapatkan DAK Fisik Kementerian Perindustrian RI yaitu lanjutan Pembangunan Sentra IKM Gambir di nagari Koto taratak Kecamatan Sutera. Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berkewajiban mempersiapkan dokumen perencanaan lengkap untuk Pembangunan ini.

D. Pengawasan, Pengendalian Perizinan Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

1. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi industri dilakukan untuk memberikan keterjaminan atas tersedianya data IKM yang akurat, lengkap dan terkini. Output dari kegiatan ini adalah direktori data IKM, yang digunakan nantinya sebagai pelaporan dan juga basis perencanaan kedepannya.
2. Percepatan penyampaian data IKM melalui SIINas, yang mana salah satu syarat terdافتarnya IKM pada SIINas adalah legalitas IKM yaitu NIB dan IUI. Target yang diharapkan adalah terdatanya seluruh IKM pada direktori IKM Pesisir Selatan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3. Percepatan penyampaian data SIINas melalui dana Dekonsentrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional/provinsi

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan provinsi Sumatera Barat :

Perbandingan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) dengan Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.31
Perbandingan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)
dengan Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Pesisir Selatan			Prov Sumatera Barat		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	725,44	741,26	741,26*	16.628,39	16.917,97	16.917,97*

Tabel 3.32
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
dengan Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Pesisir Selatan			Prov Sumatera Barat		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Laju Pertumbuhan sektor Industri (ADHK)	%	3,58	2,18	2,47	3,72	1,74	1,74*

Tabel 3.33
Perkembangan Nilai PDRB (ADHK) sektor Industri Pengolahan dan Laju
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	703,61	707,32	717,93	725,44	741,26	759,55

- 1. Faktor Keberhasilan Nilai PDRB sektor industri pengolahan**
 - a. Geliat ekonomi Masyarakat di bidang industri yang sudah mulai stabil pasca Covid-19
 - b. Adanya dukungan dari Pusat dalam hal pembangunan sarana dan prasarana IKM melalui dana DAK Fisik Pembangunan Sentra IKM dan DAK non Fisik Penguatan Kelembagaan Sentra IKM.
 - c. Penataan Sistem pengelolaan data industri nasional (SIINas), memungkinkan program pemberdayaan industri nasional lebih

- merata dan dapat menyentuh IKM di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti program OVOP, Business Matching, dll
- d. Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM

2. Hambatan yang dihadapi dalam peningkatan Nilai PDRB sektor industri pengolahan.

- a. Masih rendahnya daya saing produk IKM yang disebabkan karena kualitas Sumber Daya Manusia Industri yang masih rendah, terutama dalam hal :
- Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis
 - Penguasaan teknologi produksi
 - Pengembangan produk yang berorientasi pada mutu
 - Daya inovasi (diversifikasi produk dan pengembangan kemasan)
 - Pengembangan produk yang berbasis sumber daya lokal.
- b. Belum terwujudnya komitmen dan sinergitas kebijakan *stakeholder* dalam pengembangan IKM.
- c. Kurangnya jumlah tenaga ahli pembina dan penyuluh industri dan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis

3. Upaya yang dilakukan

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen, standarisasi dan sertifikasi produk IKM, serta membangun kemitraan dengan swasta/ BUMN/BUMD, lembaga pengujian dan desain produk serta perguruan tinggi. ,
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya produksi produk lokal unggulan dalam rangka mewujudkan program nasional TKDN dan P3DN.
- c. Percepatan operasional Sentra IKM, sehingga dapat menghidupkan perekonomian Masyarakat di sekitar sentra
- d. Pemilihan metode pembinaan industri yang tepat, dapat berupa jenis pelatihan, metode pendampingan, peningkatan kualitas produk sehingga dapat mengungkit nilai jual dan omset IKM serta diversifikasi produk olahan
- e. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemberdayaan IKM dan sentra IKM

Dalam mendukung pencapaian Indikator Nilai PDRB (ADHK), Dinas Perdagangan dan Transmigrasi melaksanakan 2 (dua) program untuk pencapaian indikator Nilai PDRB Sektor Perindustrian (ADHK) dan Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian dan 7 (tujuh) program untuk pencapaian indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan, berikut rincian Program pendukung capaian Nilai PDRB (ADHK) dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan subkegiatan (a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (b) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (c) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Target anggaran pada program ini adalah sebesar Rp 18.431.814.643 dengan realisasi sebesar Rp 18.056.324.563 dan capaian 97,96%
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dan subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Target anggaran Rp 40.000.030 dengan realisasi sebesar Rp 39.966.750 dan capaian 99,92 %
3. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dan kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.Target anggaran Rp 2.838.352.585 dengan realisasi sebesar Rp 2.822.407.900 dan capaian 99,44%
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan subkegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat. Target anggaran Rp 31.500.109 dengan realisasi sebesar Rp 31.093.000 dan capaian 98,71%
5. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan dengan subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera,Tera Ulang. Target anggaran

252.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 250.868.128 dan capaian 99,55 %.

- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan subkegiatan Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan. Target anggaran 45.539.519 dan realisasi sebesar Rp 45.296.100 atau capaian 99,47 %

Dengan demikian Total anggaran pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang dianggarkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 21.639.206.886, dengan realisasi sebesar Rp 21.245.956.441 atau capaian 98,18%. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 terdapat efisiensi sebesar Rp 393.250.445 atau 1,82 %

Adapun prestasi yang diperoleh adalah Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut menjadi 1 (satu dari 3 (tiga) Kawasan Transmigrasi dengan Status berdaya Saing dengan Indeks 76,53 pada tahun 2023 , Sertifikat Kabupaten dengan penginupan harga terbaik dalam Upaya penanggulangan inflasi tahun 2023 dan Juara I Desain Busana Batik pada Festival Batik Sumbar di Kota Sawahlunto.

Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut menjadi 1 (satu dari 3 (tiga) Kawasan Transmigrasi dengan Status berdaya Saing dengan Indeks 76,53 pada tahun 2023

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 266 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023
 DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
 Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan kawasan transmigrasi tahun 2023 dengan parameter dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana dan keberagaman pada 52 (lima puluh dua) kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 100 (seratus) kawasan transmigrasi prioritas Kementerian, diperoleh Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tentang Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023;
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192).

INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PADA 52 KAWASAN TRANSMIGRASI PRIORITYAS NASIONAL TAHUN 2023

NO.	NAMA KAWASAN	PROVINSI	DIMENSI	HASIL PENGUKURAN TAHUN 2023		
				INDEKS	INDEKS IPK	IPK DIMENSI KOMPOSIT TRANS
1.	Batu Betung	Bengkulu	Ekonomi	72,53	28,43	67,82
			Sosial Budaya	65,52	7,89	
			Lingkungan	65,24	8,8	
			Prasarana dan Sarana	90,55	16,96	
			Keterbangan	87,06	6,71	
2.	Raso Jaya	Kalimantan Barat	Ekonomi	78,24	30,67	77,72
			Sosial Budaya	70,12	9,14	
			Lingkungan	73,00	8,90	
			Prasarana dan Sarana	41,77	23,13	
			Keterbangan	75,34	8,96	
3.	Tobadak	Sulawesi Utara	Ekonomi	65,54	20,69	65,09
			Lingkungan	66,27	7,35	
			Prasarana dan Sarana	67,57	19,11	
			Keterbangan	65,83	7,74	
4.	Dabawa Baru	Kalimantan Selatan	Ekonomi	72,87	28,56	70,00
			Sosial Budaya	60,44	7,87	
			Lingkungan	52,46	4,05	
			Prasarana dan Sarana	80,36	23,74	
5.	Yalang	Sulawesi Selatan	Ekonomi	87,62	6,78	68,91
			Sosial Budaya	69,98	27,84	
			Lingkungan	63,34	8,51	
			Prasarana dan Sarana	79,12	9,88	
			Keterbangan	69,83	19,75	
6.	Lunang Silaut	Sulawesi Utara	Ekonomi	68,96	7,72	76,53
			Sosial Budaya	23,18	28,60	
			Lingkungan	51,24	11,21	
			Prasarana dan Sarana	71,24	3,51	
			Keterbangan	72,02	8,54	

NO.	NAMA KAWASAN	PROVINSI	DIMENSI	HASIL PENGUKURAN TAHUN 2023			STATUS
				INDEKS	INDEKS IPK	IPK DIMENSI KOMPOSIT TRANS	
47.	Batun III Ulu	Jambi	Ekonomi	43,29	16,97	45,44	Berkembang
			Sosial Budaya	45,69	5,52		
			Lingkungan	45,23	3,50		
			Prasarana dan Sarana	43,80	12,39		
			Keterbangan	56,37	6,63		
48.	Muting	Papua Selatan	Ekonomi	40,83	19,00	47,69	Berkembang
			Sosial Budaya	48,86	6,37		
			Lingkungan	47,58	3,68		
			Prasarana dan Sarana	54,04	15,29		
			Keterbangan	54,00	6,35		
49.	Belantikan Raya	Kalimantan Tengah	Ekonomi	34,07	13,36	40,15	Berkembang
			Sosial Budaya	49,36	6,43		
			Lingkungan	47,58	3,68		
			Prasarana dan Sarana	40,40	11,43		
			Keterbangan	44,64	5,25		
50.	Senggol	Papua	Ekonomi	42,18	16,53	44,04	Berkembang
			Sosial Budaya	46,96	6,12		
			Lingkungan	41,00	3,17		
			Prasarana dan Sarana	50,57	14,31		
			Keterbangan	40,91	4,81		
51.	Werianggi-Werakur	Papua Barat	Ekonomi	26,61	10,43	42,27	Berkembang
			Sosial Budaya	57,92	7,85		
			Lingkungan	59,73	4,62		
			Prasarana dan Sarana	54,50	15,42		
			Keterbangan	36,16	4,25		
52.	Pulau Mangoli	Maluku Utara	Ekonomi	43,45	17,03	45,69	Berkembang
			Sosial Budaya	53,60	6,98		
			Lingkungan	35,14	2,72		
			Prasarana dan Sarana	52,01	14,71		
			Keterbangan	36,05	4,24		
RATA-RATA				55,35			

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI,

 Ir. DANTON GINTING MUNTHE, M.M.
 NIP. 19680714 199403 1 001

Kabupaten dengan Penginputan Harga terbaik dalam upaya penanggulan inflasi Tahun 2023



Lokasi : Kantor Kementerian Perdagangan RI

Tanggal : 9 November 2023

Pemberi sertifikat : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Juara 1 Desain Busana Batik pada Festival Batik Sumbar di Kota Sawahlunto



3. *Indek Gini*

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1.

Semakin tinggi/mendekati satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Semakin kecil angka indeks gini akan semakin baik, karena mengindikasikan bahwa pemerataan distribusi ekonomi penduduk di suatu wilayah yang semakin baik atau ketimpangan ekonomi penduduk suatu wilayah yang semakin minim. Selain itu, penurunan ketimpangan juga dapat mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Indek Gini sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.34 berikut ini:

Tabel 3.34
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Gini Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Gini	Tanpa satuan	0,25	0,259	96,40

Formulasi capaian indikator kinerja Indek Gini

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

P_i = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke- i

Q_i = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- i

Nilai indek Gini berkisar antara 0 dan 1, jika : $G < 0,3$ = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang

$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indek Gini pada tahun 2023 adalah 0,25 dan terealisasi 0,259 dengan capaian indikator kinerja adalah 96,40%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan atau kekayaan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam suatu wilayah atau negara. Sebaran pendapatan

atau kekayaan tersebut tidak akan merata antar individu. Akan tetapi, bisa menjadi masalah apabila perbedaan tersebut sangat besar. Perbedaan penyebaran pendapatan atau kekayaan tersebut dikenal dengan ketimpangan. Salah satu indikator yang mengukur ketimpangan adalah indeks gini

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Gini tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.35 di bawah ini.

Tabel 3.35
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Gini
Tahun 2021-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indek Gini	Tanpa satuan	0,25	0,25	0,25	0,253	0,246	0,259	98,81	101,63	96,40

Tabel diatas menunjukkan perkembangan indeks gini Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 hingga tahun 2023. Indeks Gini Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 yaitu 0,246 lebih rendah dibandingkan indeks gini pada tahun 2023 yaitu 0,259 dan tahun 2021 yaitu 0,253. Berdasarkan klasifikasi penilaian realisasi dan capaian tahun 2023, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Indeks Gini.

Tahun 2023 Indeks Gini Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,013 poin dari 0,246 pada tahun 2022 menjadi 0,259. Kenaikan ini dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan semakin melebar. Indeks gini rasio sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu ketimpangan pendapatan ini disebabkan diantaranya karena terjadinya inflasi, kenaikan garis kemiskinan dan peningkatan angka pengangguran. Kenaikan inflasi dapat melemahkan daya beli masyarakat, terutama daya beli terhadap kebutuhan pokok sehingga dapat mempengaruhi keadaan ekonomi terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah dan rendah. Selain itu dengan adanya kenaikan garis kemiskinan, masyarakat yang berada dalam keadaan rentan miskin akan jatuh menjadi miskin bahkan yang sudah miskin akan jatuh lebih dalam dibawah garis kemiskinan yang

ditetapkan. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Indeks Gini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh keberhasilan indikator makro lainnya yakni laju inflasi yang rendah, menurunnya angka kemiskinan dan menurunnya angka pengangguran.

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pencapaian Indeks Gini

1. Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai rentang wilayah yang luas dan memanjang
2. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tingginya laju inflasi di daerah
4. Banyaknya pengangguran

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya :

1. Mengurangi ketimpangan antar wilayah
2. Mengendalikan laju inflasi dengan mengaktifkan tim pengendali inflasi daerah
3. Peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
5. Pengembangan koperasi dan UMKM
6. Penyediaan pendidikan yang berkualitas
7. Pembangunan infrastruktur yang merata
8. Mendorong pemerataan ekonomi melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian, perikanan dan pangan

Indikator Indeks Gini ditunjang oleh beberapa program sama dengan Indikator Pertumbuhan Ekonomi untuk mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan. Anggaran untuk mendukung sasaran ini yaitu program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), program pengelolaan pelayaran, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengelolaan sistem informasi industri nasional, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,

program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program penyuluhan pertanian dan program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) dengan target anggaran Rp.78.050.562.231.- dan realisasi sebesar Rp.71.964.970.799 atau capaian 92,20% berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program untuk mendukung capaian sasaran tersebut terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.6.085.591.432 atau 7,80 %.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahtera Masyarakat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 terdiri dari 1 (indikator kinerja), dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.36 berikut ini:

Tabel 3.36
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	5700	5620	98,59

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam 1 (satu) tahun

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2023 adalah 5700 dan terealisasi 5620 dengan capaian indikator kinerja adalah 98,59%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Indikator serapan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing kecamatan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat ketersediaan fasilitas sarana hotel/penginapan dan rumah

makan/restoran yang nyaman dan aman bagi wisatawan, sebagai fasilitas sarana penunjang dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan datang berwisata ke Kabupaten Pesisir Selatan.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.37 di bawah ini.

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	4700	5200	5700	4800	5100	5620	102,13 %	98,08 %	98.59 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, ada kenaikan realisasi Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun namun namun capaiannya pada tahun 2021 melebihi target, namun capaian tahun 2022 dan 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Target jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tahun 2021 adalah 4700 dengan realisasi 4800 sehingga capaian kinerja 102,13% , target pada tahun 2022 adalah 5200 dengan realisasi 5100 sehingga capaian kinerja 98,08 dan target pada tahun 2023 adalah 5700 dengan realisasi 5620 sehingga capaian kinerja 98.59%. Berdasarkan klasifikasi penilaian realisasi dan capaian tahun 2023, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan dengan standar nasional/ provinsi realisasi 3 tahun terakhir juga sama-sama mengalami peningkatan. Pariwisata Indonesia khususnya Sumatera Barat mengalami peningkatan tenaga kerja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Mengacu kepada data Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, pada awal tahun 2021 jumlah tenaga kerja pariwisata mencapai 16,22 persen. Tenaga kerja pariwisata paling banyak berusia 41-56 tahun (37,41 persen), diikuti oleh yang berusia 25-40 tahun

(35,78 persen), usia 15-24 tahun (sekitar 16,68 persen), dan usia 60 tahun ke atas (10,13 persen). Sementara itu, menurut tingkat pendidikan, tenaga kerja pariwisata kebanyakan berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dengan proporsi sebesar 50,82 persen, diikuti oleh yang berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebesar 41,43 persen, dan yang berpendidikan tinggi (diploma ke atas) sebesar 7,75 persen. Walaupun persentase tenaga kerja pariwisata berpendidikan tinggi merupakan yang paling rendah, namun persentasenya terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2021-2023. Tenaga kerja di sektor parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif) yaitu gabungan tenaga kerja sektor pariwisata dan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif pada tahun 2021 sebanyak 33,47 juta orang dengan share sebesar 25,54 persen terhadap seluruh penduduk bekerja di Indonesia. Jumlah dan share tenaga kerja parekraf mengalami peningkatan selama tahun 2020-2021, dimana pada tahun 2020 sebesar 30,64 juta orang (23,85 persen). Dari 33,47 juta tenaga kerja parekraf pada tahun 2021, sebanyak 11,57 juta orang bekerja di sektor pariwisata saja, sebanyak 12,21 juta orang bekerja di sektor ekonomi kreatif saja, dan sebanyak 9,68 juta orang (28,94 persen) bekerja pada lapangan usaha yang termasuk sektor pariwisata dan juga sektor ekonomi kreatif.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah :

1. Pelonggaran pembatasan perjalanan dengan aturan protokol Covid 19 bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang telah dimulai sejak 2022 membuat dunia pariwisata makin mengeliat kembali sehingga banyak membutuhkan tenaga kerja.
2. Trend promosi pariwisata melalui berbagai media di internet.
3. Mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menyiapkan iven berbasis potensi desa

TABEL 3.38

**DAFTAR KELOMPOK SADAR WISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

NO	NAMA POKDARWIS	ALAMAT	DAYA TARIK WISATA
1	2	3	4
1	POKDARWIS CAROCOK PANTAI PAINAN	Carocok Painan Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai	Wisata Pantai, Pulau, Atraksi Bahari, Permainan Anak2, Kuliner, dll

2	POKDARWIS GUNJANTINO	Nagari Puluik2 Kec. Ampek Nagari Bayang Utara	Trecking, Alam/Pegunungan
3	POKDARWIS BATU PUTI INDAH	Nagari Api-api Kec. Bayang	Pantai/Bahari
4	POKDARWIS NAGARI SAGO	Nagari Sago, Kec. IV Jurai	Pantai/Bahari
5	POKDARWIS NAGARI SALIDO	Nagari Salido Kec. IV Jurai	Pantai/Bahari
6	POKDARWIS SAKO INDAH ALAMI	Nagari Sei. Gambir Sako Kec. Ranah IV Hulu Tapan	Alam / pegunungan
7	POKDARWIS BAHARI MADHANI	Nagari Sei. Nyalo Mudiak Aie Kec. Koto XI Tarusan	Wisata Bahari
8	POKDARWIS MANDEH	Nagari Mandeh Kec. Koto XI Tarusan	Wisata Bahari
9	POKDARWIS SARASAH KAMUMUAN	Nagari Salido Sari Bulan Kec. IV Jurai	Alam/Pegunungan, Terowongon, PLTA
10	POKDARWIS KMB CAROCOK ANAU	Nagari Carocok Anau Kec. Koto XI Tarusan	Perahu wisata
11	POKDARWIS TANSRIDANO	Nagari Taluk Kec. Batang Kapas	Pantai / Bahari
12	POKDARWIS LABUANG BARUAK	Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas	Pantai / Bahari / Pegunungan
13	POKDARWIS LASKAR PEDULI LINGKUNGAN	Nagari Amping Parak, Kec. Sutera	Konservasi lingkungan, penangkaran penyu, mangrove, pantai dan perahu wisata
14	POKDARWIS WASTAM	Nagari Limau Gadang Lumpo Kec. IV Jurai	Konservasi TNKS, Air Terjun, Sungai, Arung Jeram dan Trecking
15	POKDARWIS SUTA MANDIRI	Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas	Pantai, wisata air dan Atraksi wisata,
16	POKDARWIS EKO WISATA IKAN LARANGAN	Nagari Kambang Timur, Kec. Lengayang	Embung, Ikan larangan, atraksi wisata
17	POKDARWIS MUARA KANDIH	Nagari Muara Kandis Punggasan Kec. Linggo Sari baganti	Jembatan Pelangi, Sungai dan Atraksi
18	POKDARWIS MOELATI MAS	Nagari Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan	Pantai Taluk Sikulo, Pantai Batu Kalang
19	POKDARWIS BATU BAIDUANG	Nagari Pancuang Taba Kec. IV Nagari Bayang Utara	Negeri diatas awan, pegunungan, kuliner kacang dilan
20	POKDARWIS TALUN 7 BIDADARI	Nagari Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal	Air terjun 7 bidadari

21	POKDARWIS SIGUNTUR TUA	Nagari Siguntur Tua Kec. Koto XI Tarusan	Air terjun Sarasah Siguntur Tua
22	POKDARWIS KARANG PUTIH KAPUJAN	Nagari Kapujan Koto Berapak Bayang, Kec. Bayang	Air Terjun, alam yg indah dan kuliner
23	POKDARWIS ANUGERAH PANTAI	Nagari Pasar Lama Air Haji, Kec. Linggo Sari Baganti	Wisata Bahari, Pantai, dan kuliner
24	POKDARWIS GUNUANG GADANG	Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas	Wisata Bahari, Pantai, dan kuliner
25.	POKDARWIS PESONA TIMBULUN	Nagari Painan Timur Painan, Kec. IV Jurai	Air Terjun, alam yg indah, kuliner dan seni budaya
26	POKDARWIS LE PARADIS . SP	Nagari Sungai Pinang Mandeh Kec. Koto XI Tarusan	Ekowisata mangrove, pantai, selam, dan surfing
27	POKDARWIS RUMAH GADANG MANDE RUBIAH	Nagari Lunang Kec. Lunang	Wisata Budaya, Sejarah dan Makam Raja-raja
28	POKDARWIS SARIAK GEOPARK	Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih	Wisata alam, mangrow, geopark dll
29	POKDARWIS TARATAK SEPAKAT WISATA	Nagari Taratak Kec. Sutera	Agro Wisata, Tambak Ikan, Tambak Udang Kebun Lengkeng, Durian, dan Kuliner
30	POKDARWIS SINAR UTAMA	Nagari Pondok Parian Kec. Lunang	Tabek/Embung, Agro Wisata, dll
31	POKDARWIS TELUK KUALO INDRAPURA	Nagari Teluk Kec. Airpura	Agro Wisata, Tambak Ikan, Tambak Udang, Kebun Lengkeng Durian dan Kuliner
32	POKDARWIS BOAT WISATA BATU KALANG	Nagari Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan	Boat Wisata Teluk Sikulo
33	POKDARWIS BALAI LAMO SALIDO	Nagari Salido Kec. IV Jurai	Pantai, Kuliner dan Seni Budaya
34	POKDARWIS MUARO BANTIANG	Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan	Pantai, Kuliner dan Seni Budaya
35	POKDARWIS NAGARI KOTO BARU KOTO BARAPAK	Nagari Koto Baru Koto Barapak Kec., Bayang	Air Terjun, Treking, Kolam Pemandian, Seni Budaya dan Kuliner

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain :

1. Terjadinya inflasi.
2. Masih kurang promosi pariwisata dan publikasi pariwisata
3. Kurangnya tenaga kerja yang profesional.
4. Pertumbuhan destinasi wisata baru di kabupaten/ kota lain.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain :

1. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku Wisata.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wisatawan.
3. Meningkatkan SDM dan Promosi Destinasi Pariwisata Kab. Pesisir Selatan
4. Mendatangkan tenaga narasumber yang berpengalaman dalam memberikan pelatihan.
5. Menciptakan inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja.

Dalam DPA 2023, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata sebesar Rp 9.406.554.802. Anggaran tersebut terdistribusi ke dalam komponen dan sub komponen dengan bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi penyediaan sarana prasarana pariwisata dan olahraga serta perencanaannya, peningkatan sumber daya manusia bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan iven pariwisata.

Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang ditetapkan pada setiap awal tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut disadari tidaklah mudah, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai bagian dari wujud peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama (stake holders).

Indikator ini ditunjang oleh program *Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata* dan program *Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* Dengan target anggaran Rp 9. 406.554.802 Dan realisasi sebesar Rp 9.225.544.453 Atau capaian 97,35%, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 181.010.349 Atau 2,65%.

Melalui mekanisme evaluasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran, yang berpengaruh pada capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Perubahan ini

disebabkan oleh pengaruh kondisi keuangan daerah yang menyebabkan perlunya perubahan tersebut. Hal ini dapatlah dipahami sebagai arah kebijakan untuk secara terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan, inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja dari waktu ke waktu

Sasaran 7 : Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.39 berikut ini:

Tabel 3.39
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	persen	13	7,27	55,82

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan

$$\frac{\text{Jumlah sekolah SD dan SMP yang sudah mencapai SNP}}{\text{Jumlah sekolah SD dan SMP}} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah 13% dan terealisasi Tinggi 7,27% dengan capaian indikator kinerja adalah 55,82%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Cukup** dengan predikat **Cukup**.

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu tujuan negara yang mempunyai arti sangat luas dan membutuhkan kesungguhan dalam mencapainya. Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas tentu harus didukung dengan sistem yang jelas. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan satu aturan yang sangat jelas tentang bagaimana Pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilaksanakan untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang cerdas.

Untuk menjalankan fungsi tersebut diperlukan suatu pedoman penjaminan mutu pendidikan yang mampu menggiring proses pelaksanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan, sebagaimana yang disebutkan dalam Permendikbud nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Standar mutu yang dimaksud di sini adalah standar mutu minimal yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 2 ayat 1 menyebutkan tentang lingkup standar nasional meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya Permendikbud nomor 28 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

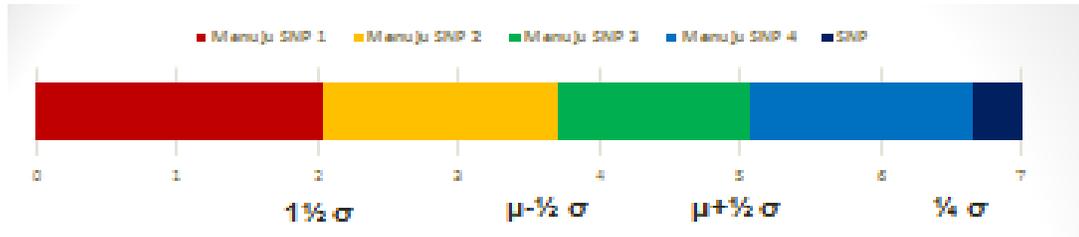
Pada Tahun 2021 Metode analisis data yang digunakan dalam peta mutu pendidikan ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan tentang capaian SNP satuan pendidikan, capaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan, dan capaian indikator per jenjang pendidikan. Keluaran hasil analisis data berbentuk penskoran dan warna. Penskoran dan warna dapat dilihat dalam web PMP

Data capaian SNP hasil pemetaan mutu pendidikan dalam bentuk nilai dan status capaian per standar, per indikator, dan per sub indikator, tingkat sekolah dan untuk setiap jenjang sekolah dapat diakses pada web <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/>. Standar, indikator dan sub-indikator tersebut merujuk pada isi pertanyaan dalam instrumen PMP yang diisi responden pada saat kegiatan pengumpulan data mutu dan data pokok pendidikan.

Mulai tahun 2022 sampai sekarang nilai capaian mutu delapan standar nasional pendidikan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah sekolah yang terakreditasi A di level pendidikan PAUD, SD dan SMP dengan

jumlah seluruh sekolah yang ada, karena nilai tersebut sudah tidak dikeluarkan lagi pada aplikasi web <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/>.

Adapun capaian pemenuhan SNP dibagi dalam 5 kategori, sebagaimana berikut:



Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
Menuju SNP 1	0,00	2,04
Menuju SNP 2	2,05	3,70
Menuju SNP 3	3,71	5,06
Menuju SNP 4	5,07	6,66
SNP	6,67	7,00

Makna kategori capaian sebagai berikut :

1. Sekolah menuju SNP 1 adalah sekolah yang berada pada anak tangga paling bawah dengan batas bawah 0,00 dan batas atas 2,04 (29% pencapaian SNP atau 71% lagi menuju SNP)
2. Sekolah menuju SNP 2 adalah sekolah yang berada pada anak tangga yang kedua dengan batas bawah 2,05 dan batas atas 3,70 (53% pencapaian SNP atau 47% lagi menuju SNP)
3. Sekolah menuju SNP 3 sekolah yang berada pada anak tangga yang ketiga dengan batas bawah 3,71 dan batas atas 5,06 (72% pencapaian SNP atau 28% lagi menuju SNP)

4. Sekolah menuju SNP 4 sekolah yang berada pada anak tangga yang keempat dengan batas bawah 5,07 dan batas atas 6,66 (95% pencapaian SNP atau 5% lagi menuju SNP)
5. Sekolah SNP adalah sekolah yang berada pada anak tangga yang kelima dengan batas bawah 6,67 dan batas atas 7,00 (sudah Mencapai SNP).

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.40 di bawah ini.

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	Persen	10,56	12,72	13	5,34	6,45	7,27	50,57	50,71	55,82

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa secara umum Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan, namun masih dibawah target, pada tahun 2021 target 10,56 realisasi 5,34 dengan capaian 50,57, pada tahun 2022 target 12,71 realisasi 6,45 dengan capaian 59,71 dan pada tahun 2023 target 13 realisasi 7,27 capaiannya 55,82. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Cukup** dengan predikat **Cukup**.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian 8 Standar Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pemenuhan delapan standar mutu pendidikan;
2. Mengaktifkan kembali peran dewan pendidikan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;

3. Meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendampingi Pembelajaran Anak di luar sekolah;
4. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi guru;
5. Meningkatkan peran swasta dalam mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui dana CSR;
6. Melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemenuhan 8 standar mutu pendidikan oleh pengawas satuan pendidikan di sekolah binaan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pencapaian 8 Standar mutu Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk Daerah Rawan Bencana, sehingga mengakibatkan sarana rusak dan terganggunya proses pembelajaran;
2. Keterbatasan sumber daya baik sumber manusia, teknologi maupun keuangan disebagian satuan pendidikan;
3. Kualitas tenaga pendidik belum maksimal;
4. Masih banyak masyarakat kurang mampu;
5. Masih terbatasnya akses transportasi umum ke sekolah.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam upaya mewujudkan pencapaian 8 Standar mutu Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Meningkatkan Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Melaksanakan Program Nagari Bersekolah (Pronasa) dengan membentuk komunitas belajar (Kombel) sesuai minat dan bakat siswa;
4. Mengoptimalkan transportasi umum untuk anak sekolah di beberapa kecamatan yang kesulitan akses dan ekonomi;
5. Mengoptimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam rangka pendampingan dan pengawasan peserta didik di luar sekolah;
6. Mengaktifkan kembali peran dewan pendidikan dan stakeholder dalam perencanaan sector pendidikan

Dalam pencapaian indikator Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan pada tahun 2023 di dukung oleh 4 (empat) program yaitu program pengelolaan pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 170.349.761.667,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.981.045.649,- atau sekitar 70,43%. Program Pengembangan Kurikulum dengan anggaran

sebesar Rp. 135.890.859,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.612.000,- atau sekitar 56,38% Program Pengembang Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.133.698.728,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 951.182.528,- atau sekitar 83,90%. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 294.097.983,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 292.279.857,- atau sekitar 99,38%. Total Anggaran dari 4 (empat) program tersebut sebesar Rp.600.204.159.056,- dengan realisasi sebesar Rp.573.174.566.665,- atau 95,5%, , terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.27.029.592.391 atau 4,5%.

Beberapa Prestasi yang diperoleh selama tahun 2023 yaitu : guru berprestasi tingkat provinsi/nasional sebanyak 3 orang dan siswa berprestasi tingkat provinsi sebanyak 4 orang.

1. Guru Berprestasi



Penghargaan Guru Inovatif Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Penghargaan Pengawas Inovatif Tingkat Provinsi Sumatera Barat

2. Murid Berprestasi



Penghargaan Senam Gimnastik Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Penghargaan Karate Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Sasaran 8 : Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 8 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.41 berikut ini:

Tabel 3.41
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,350)	Tinggi (3,770)	112,53

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM

Penilaian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah Tinggi (3,350) dan terealisasi Tinggi (3,770) dengan capaian indikator kinerja adalah 112,53%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang telah disesuaikan dengan konteks lokal.

Penyusunan IDSD 2023 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dilakukan melalui proses yang ketat, dimulai dari pemantapan kerangka konseptual sampai dengan penghitungan skor dari level indikator, pilar, hingga skor akhir IDSD secara agregasi. Dalam proses penyusunannya, melibatkan pakar-pakar yang relevan dan peneliti dari pusat riset terkait. Mengikuti ketersediaan data, IDSD 2023 mencakup 34 provinsi untuk 514 kabupaten/kota di Indonesia. Penyempurnaan IDSD 2023 menghasilkan 63 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota. Data sekunder yang digunakan bersumber dari kementerian/lembaga yang merupakan produsen data indikator daya saing

Konsep dasar daya saing ini mengalami penyesuaian, terutama dengan menguatnya tuntutan untuk fokus pada kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan (dalam hal ini TIK) dan respon terhadap guncangan (shock), baik internal maupun eksternal (kestabilan ekonomi makro). Penyesuaian ini dituangkan ke dalam empat komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi kerangka pengukuran IDSD 2023, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini tetap dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Untuk tetap menjaga objektivitas pengukuran, seluruh data pada IDSD 2023 masih menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Ada 4 Komponen dalam IDSD 2023,

1. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.
2. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari

angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

3. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.
4. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Nilai Indeks Daya Saing Daerah untuk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 3.42 berikut ini

Tabel 3.42
 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. SUMATERA BARAT	4,65	2,87	3,29	3,05	3,75	4,05	3,64	3,79	2,71	3,59	3,73	3,88	3,58
RATA-RATA KAB/KOTA	4,40	2,31	4,07	3,00	3,89	3,87	3,62	3,52	1,30	3,96	2,95	1,83	3,29
KEPULAUAN MENTAWAI	-	1,41	2,27	3,20	3,45	3,38	2,30	2,28	0,30	3,59	2,05	1,34	-
PESISIR SELATAN	4,46	2,09	3,49	3,06	3,94	3,61	2,80	3,54	1,72	4,11	3,27	0,93	3,09
KAB. SOLOK	4,34	1,91	3,26	2,81	3,78	3,38	2,71	3,60	0,70	4,13	2,90	1,54	2,92
SIJUNJUNG	4,22	2,03	3,75	3,07	3,59	3,57	2,87	3,58	1,22	3,96	2,23	0,83	2,91
TANAH DATAR	4,49	2,45	4,41	2,85	3,88	3,63	3,24	3,33	1,31	4,12	4,65	2,88	3,44
PADANG PARIAMAN	4,17	3,51	4,16	2,98	3,79	3,58	3,48	3,48	0,96	4,22	2,71	1,18	3,19
AGAM	-	2,05	4,40	2,99	4,06	3,83	3,31	3,45	0,78	4,30	2,43	2,08	-
LIMA PULUH KOTA	4,28	1,86	3,60	2,99	3,85	3,55	3,30	3,12	-	4,18	2,17	2,58	-
PASAMAN	4,36	1,61	3,33	3,01	3,69	3,52	2,85	3,20	1,49	3,92	2,42	0,79	2,85
SOLOK SELATAN	4,28	1,58	3,44	3,24	3,72	3,58	3,14	3,02	0,73	3,72	3,17	0,69	2,86
DHARMASRAYA	4,29	1,46	4,38	2,97	3,99	3,61	3,20	3,27	1,19	4,01	2,83	1,75	3,08
PASAMAN BARAT	4,18	1,53	3,76	2,87	3,70	3,37	2,57	3,52	1,38	4,19	2,04	0,75	2,82
PADANG	4,63	3,05	4,06	2,55	4,15	4,51	4,76	4,12	2,76	4,79	3,24	4,57	3,93
PESISIR SELATAN	4,46	2,09	3,49	3,06	3,94	3,61	2,80	3,54	1,72	4,11	3,27	0,93	3,09
SAWAH LUNTO	-	2,97	4,70	2,73	3,88	4,26	4,23	3,79	0,54	3,56	2,85	0,75	-
PADANG PANJANG	4,57	2,96	5,00	3,08	4,07	4,55	5,00	4,24	1,10	3,53	2,74	3,12	3,66
BUKITINGGI	4,61	2,83	5,00	3,41	4,22	4,52	5,00	3,93	2,30	3,92	3,52	2,94	3,85
PAYAKUMBUH	4,68	2,30	4,86	3,06	4,16	4,36	5,00	3,88	1,91	3,77	3,03	1,95	3,58
PARIAMAN	4,23	3,21	4,77	2,90	3,89	4,33	3,97	3,69	0,51	3,68	3,56	2,64	3,45

Berikut data Indikator Pilar Indek Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tabel
Indikator Pilar Indeks Daya Saing Daerah

Bidang Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2023

No.	Pilar	Dimensi	Indikator	Sumber Data	Nilai Indeks
1.	Kesehatan	Kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota	3,94
2.	Keterampilan	Tenaga Kerja saat ini (Current workforce.)	1. Rata-rata tahun sekolah	Rata-rata tahun sekolah	2,84
			2. Keterampilan lulusan	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	3,29
			3. Keterampilan digital	Indeks literasi digital	
			4. Kemudahan menemukan	1. Penduduk Berumur 15	3,33

No.	Pilar	Dimensi	Indikator	Sumber Data	Nilai Indeks
			pekerja terampil	Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Penduduk angkatan kerja; 2. Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja atau penduduk berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja selama satu minggu yang lalu menurut Jenis Kelamin dan menurut Kabupaten/Kota; 3. Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja atau penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja,	

No.	Pilar	Dimensi	Indikator	Sumber Data	Nilai Indeks
				atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (Orang) menurut Provinsi, Kabupaten/Kota.	
		Tenaga kerja masa depan (Future workforce)	5. Angka harapan sekolah	Harapan lama sekolah	3,82
	6. Berpikir kritis dalam mengajar		Daftar guru SD-SMA/SMK yang memiliki sertifikat	3,79	
	7. Rasio murid-guru pendidikan dasar		Rasio murid terhadap guru	4,57	

Sumber : Metadata Indikator IDSD Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2023

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.43 di bawah ini.

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Daya Saing	Tanpa satuan	Tinggi (3,125)	Tinggi (3,20)	Tinggi (3,35)	Tinggi (3,00)	Tinggi (3,55)	Tinggi (3,77)	98 %	110,93 %	112,53 %

Daerah									
Bidang									
SDM									

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa secara umum Indeks Daya Saing Daerah Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu score 3,77 dengan capaian kinerja 112,53% Capaian Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2021 masih dibawah target dengan score 3,00 sehingga capaian kinerja 96% hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemic covid 19 yang melanda dunia. Namun pada tahun 2022 dan 2023 capaian kinerja naik menjadi 110,93% dan 112,53%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

IDSD Bidang Sumber Daya Manusia di Pilar 5 Kesehatan, nilainya 3.97 di atas Nasional yang di angka 3.79, dan juga di atas angka provinsi 3.75. Sedangkan pada Pilar 6 Keterampilan nilainya 3.61 masih di bawah Nasional yang memiliki nilai 3.77, juga di bawah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai 4.05.

Faktor-faktor yang menjadikan nilai Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumberdaya Manusia masih memerlukan perbaikan di masa mendatang karena Nilai Pilar 5 Kesehatan memiliki nilai di atas capaian Nasional dan Provinsi, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan sudah pada jalur yang benar. Pilar kesehatan merefleksikan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang bayi dengan kesehatan yang baik. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya berperan sebagai faktor produksi, namun sebagai modal dasar pembangunan secara keseluruhan. Penduduk yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dan kreatif.

Beberapa faktor positif yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan atau memodernisas peralatan kesehatan termasuk di dalamnya pengembangan obat-obatan baru, terapi yang lebih efektif, teknologi medis diagnostik, dan prosedur bedah yang lebih canggih, yang memungkinkan penyembuhan dan pengelolaan penyakit yang sebelumnya fatal.

2. Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas seperti, Penyediaan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan primer, vaksinasi, perawatan maternal dan anak, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
3. Peningkatan Gizi dan Kualitas Hidup dengan cara Sosialisasi dan sentuhan bantuan langsung terhadap kesadaran akan pentingnya pola makan seimbang, akses terhadap makanan berkualitas, dan peningkatan gizi pada masa kanak-kanak dapat membantu mencegah berbagai penyakit terkait gizi dan meningkatkan kekebalan tubuh.
4. Perbaikan Sanitasi dan Air Bersih. Perangkat daerah secara crosscutting melaksanakan program terhadap penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dan akses terhadap air bersih yang aman untuk dikonsumsi dapat mengurangi risiko terkena penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.
5. Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan: Pendidikan yang lebih tinggi dan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat,
6. Peningkatan Keamanan dan Kesejahteraan Sosial dengan mengaktifkan Forum Kabupaten Sehat, karena lingkungan yang aman dan stabil, akses terhadap perumahan yang layak, dan kehidupan sosial yang mendukung dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap kesehatan fisik.
7. Telah dilakukan prioritas perbaikan infrastruktur publik yang mendukung. Infrastruktur publik yang memadai, seperti jaringan jalan yang baik, transportasi umum yang efisien, dan fasilitas olahraga dan rekreasi yang terjangkau, dapat memfasilitasi gaya hidup aktif dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya rata-rata tahun sekolah, lebih fokus pada pencegahan dropout atau kurang minatnya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi
2. Keterampilan masyarakat masih rendah, perlunya peningkatan pemerintah dalam memberikan kemampuan masyarakatnya dalam keterampilan lulusan sekolah termasuk keterampilan dalam teknologi digital.

3. Kurangnya usaha dalam menyediakan tenaga kerja terampil, sehingga saat ini masih sulit ditemukan pekerja terampil, sehingga masih sering mendatangkan pekerja terampil dari luar daerah
4. Dalam mengajar tenaga pendidik belum didorong untuk belajar kritis dan inovatif sehingga bisa berperan positif bagi dirinya sekaligus anak didiknya.

Untuk meningkatkan nilai IDSD Pemerintah Kabupaten Pesisir melakukan beberapa Upaya antara lain :

1. Mengadakan kampanye kesadaran tentang pentingnya pengembangan keterampilan dan pendidikan sepanjang hayat, serta memberikan informasi tentang kesempatan-kesempatan pelatihan yang tersedia bagi masyarakat.
2. Pemerintah daerah dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal dengan membangun dan memperluas jaringan sekolah, memperbarui kurikulum pendidikan, dan meningkatkan kualifikasi guru dan tenaga pendidik. Program-program pendidikan non-formal juga dapat ditawarkan untuk mereka yang sudah tidak sekolah atau tidak memiliki akses ke pendidikan formal.
3. Menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan profesional masyarakat dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh pasar kerja lokal dan regional. Pelatihan tersebut dapat mencakup keterampilan teknis seperti teknologi informasi, keahlian kerajinan, keterampilan pertanian, dan lain-lain
4. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk menyelenggarakan program pelatihan dan magang kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Ini dapat membantu memastikan bahwa keterampilan yang dipelajari oleh masyarakat sesuai dengan permintaan pasar kerja.
5. Mendirikan pusat-pusat keterampilan dan inovasi di daerah untuk memberikan akses terhadap pelatihan, sumber daya, dan fasilitas bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru dan mempromosikan inovasi.
6. Mendorong literasi digital di kalangan masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan tentang penggunaan komputer, internet, dan teknologi informasi lainnya. Hal ini penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan pendidikan dan pekerjaan
7. Mendukung program pengembangan kewirausahaan untuk membantu masyarakat memulai usaha mereka sendiri. Ini dapat

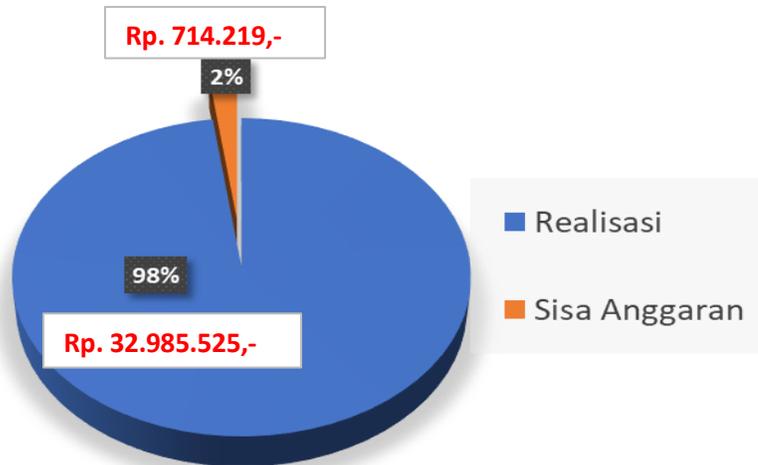
mencakup bantuan dalam perencanaan bisnis, akses ke modal usaha, pelatihan manajemen, dan dukungan lainnya untuk membangun dan mengembangkan bisnis lokal.

Pada Tahun 2022 dan 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan pengukuran daya saing daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2022 dan 2023 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *global competitiveness index* (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan *stakeholder* global untuk mengukur GCI bagi Indonesia. Data yang digunakan untuk pengukuran IDSD tahun 2022 dan 2023 adalah menggunakan data sekunder yang berasal dari Kementerian/Lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Hal ini sangat berbeda dengan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah pada Tahun 2021 yang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan industri, Perguruan Tinggi dengan Pemda setempat melalui pengisian aplikasi IDSD secara mandiri (*self-assesment*) dan online. Proses pengisian data melalui laman: <http://indeks-inovasi.brin.go.id/> yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dalam DPA Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Program Penelitian dan Pengembangan Daerah di alokasi anggaran sebesar Rp. 33.699.744,- (*tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena Pengukuran IDSD tahun 2023 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, anggaran tersebut tidak terdistribusikan dalam bentuk pengukuran IDSD, tapi terdistribusi kedalam bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah. Dari anggaran yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 32.985.525,- (*tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) atau capaian 97,88%, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi terdapat efisiensi anggaran

sebesar Rp. 714.219,- (tujuh ratus empat belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau sebesar 2,12

**Subkegiatan Penelitian, Pengembangan,
dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**



**Realisasi Pekerjaan untuk Pengukuran Indeks Daya Saing
Daerah, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah**

Adapun prestasi yang di peroleh Kabupaten Pesisir Selatan adalah Indeks Inovasi Daerah sebagai Kabupaten Inovatif untuk kategori Kabupaten se Sumatera Barat berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11.6287 Tahun 2023 dengan **Skor 58,34**. Sedangkan untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Kabupaten Terbaik III dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kabupaten se Sumatera Barat dengan Skor 74,7382 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023. Penghargaan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dari Gubernur Sumatera Barat Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat – Padang.



Penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2023



Penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah(IPKD) Tahun 2023

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan selalu berupaya untuk meningkatkan capaian Kinerja sesuai target dalam Dokumen Rencana Kerja Tahun (RKT) yang ditetapkan pada setiap awal tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut disadari tidaklah mudah, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai bagian dari wujud peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama (Stake holder). Untuk meningkatkan Inovasi, Pada tahun selanjutnya di mulai tahun 2024, semua eselon II memiliki target kinerja dan

menjadi salah satu item dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, sehingga memastikan bahwa inovasi menjadi sangat penting bagi daerah.

Sasaran 9 : Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenang dan Dinamis.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 9 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.44 berikut ini:

Tabel 3.44
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	71,42	71,34	99,89

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat

Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat pada tahun 2023 adalah 71,42 dan terealisasi 71,34 dengan capaian indikator kinerja adalah 99,89%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Berdasarkan Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024, metode penghitungan indeks kebahagiaan diukur dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu, kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Pengukuran Indeks Kebahagiaan Masyarakat dilakukan oleh BPS pada tahun 2014, 2017 dan terakhir tahun 2021 yang digunakan sebagai ukuran pembangunan yang

bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Kebahagiaan Masyarakat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.45 di bawah ini.

Tabel 3.45
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indek Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa satuan	68,42	69,92	71,42	71,34	71,34	7,34	104,27	102,03	99,89

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, tidak ada kenaikan jumlah realisasi indeks kebahagiaan masyarakat dari Tahun 2021 ke Tahun 2023 memiliki nilai yang sama karena survei terakhir yang dilakukan BPS pada tahun 2021, untuk Capaian terjadi penurunan karena realisasi tetap dari tahun 2021 sampai 2023. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Meningkatkan hubungan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya.
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan dinamis.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Masih rendah nya penghasilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan belum maksimal, karena masih terdapat masyarakat kurang mampu yang tidak ditanggung oleh BPJS APBD.

3. Keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia, teknologi maupun keuangan dalam mengintervensi kebijakan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat.

Beberapa Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Pesisir antara lain :

1. Pengembangan industri kecil dan menengah dengan kegiatan utama membina dan mengembangkan cabang industri dalam bentuk sentra.
2. Meningkatkan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM Industri Kecil menengah dan meningkatkan produk industri yang bersertifikasi dan berstandarisasi,
3. Meningkatkan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM Industri Kecil menengah dan meningkatkan produk industri yang bersertifikasi dan berstandarisasi.
4. Meningkatkan. Meningkatkan produksi komoditi pertanian, perkebunan dan hortikultura, serta komoditi hasil peternakan dan perikanan
5. Promosi pariwisata.
6. Meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
7. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta asistensi.

Indikator Indeks Kebahagiaan Masyarakat didukung oleh beberapa program dan Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp784.620.201 dan terealisasi sebesar Rp729.274.618 dengan rincian program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target anggaran Rp747.796.621 dan realisasi sebesar Rp.693.354.516 atau capaian 92,71%.
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target anggaran Rp.36.823.580 dan realisasi sebesar Rp.35.920.102 atau capaian 97,54%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung indikator Tingkat Kemiskinan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.55.345.583 atau 7,05%.

Adapun prestasi yang di peroleh adalah Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 27 Juli 2023 di Jakarta.



Selain itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperoleh penghargaan Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Komitmen Terhadap Pelindungan Anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diterima tanggal 21 Juli 2023 di Jakarta.

3.4. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, tercantum pada tabel 3.46 dibawah ini:

Tabel 3.46
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Rp1.082.363.691.957	Rp1.050.151.866.669	97,02%
2.	Meningkatnya Kualitas hidup manusia dan masyarakat	Rp4.594.795.748	Rp2.402.796.610	52,29%
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rp84.014.962.571	Rp68.659.905.201	81,72%
4.	Meningkatnya Tingkat	Rp201.586.391.411	Rp193.877.126.969	96,18 %

	Kesejahteraan Masyarakat			
5.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara berkelanjutan	Rp78.050.562.231	Rp71.964.970.799	92,20 %
6.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	Rp6.746.720.373	Rp5.716.774.348	84,73 %
7.	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	Rp171.629.567.115	Rp159.654.366.054	93,02 %
8.	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	Rp4.405.989.379	Rp4.098.958.794	93,03 %
9.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenang dan Dinamis	Rp27.960.089.930	Rp9.565.872.168	34,21 %
Jumlah		Rp1.661.352.770.715	Rp1.566.092.637.612	94,27 %

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar Rp1.661.352.770.715,- terealisasi sebesar Rp1.566.092.637.612,- atau 94,27%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp95.260.133.103,- atau 5,73%.
- b. Sisa anggaran sebesar Rp95.260.133.103,- atau 5,73%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran

Dari 9 (sembilan) sasaran yang telah ditetapkan, 5 (lima) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 107,48%, dengan nilai tertinggi adalah 118,26% yaitu sasaran “Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi”. Untuk nilai terendah dari 9 (sembilan) sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 55,82% yaitu sasaran “Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 6 (enam) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target dan 6 (enam) indikator kinerja belum mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target adalah 108,76%, dengan nilai tertinggi adalah 118,26% yaitu indikator kinerja “Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi”, sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 55,82% yaitu indikator kinerja “Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas”.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Belanja daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.566.092.637.612,- atau 94,27% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp.1.661.352.770.715,-. Dari 9 (sembilan) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi” yaitu 97,02% dan terendah adalah “Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis” yaitu 34,21%.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;

2. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
3. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023****BUPATI PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

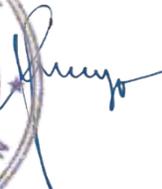
Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Painan, 25 Oktober 2023


BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BUPATI PESISIR SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	B (60,5)
2.	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1. Indek Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	70,59
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	Tahun	71.39
4.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan	Persen	6,9
		2. Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/tahun	9.369.000
5.	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,65
		2. Nilai PDRB (ADHK)	Triliyun rupiah	10,409
		3. Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25
6.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	5.700
7.	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	1. Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	Persen	13
8.	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,350)
9.	Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis	1. Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	71,42

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	428.290.709.819	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	170.349.761.667	APBD
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	135.890.859	APBD
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.988.462.837	APBD
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	82.645.718.110	APBD
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.013.360.679	APBD
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	350.127.250	APBD
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.471.273.852	APBD
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.123.967.453	APBD
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.934.561.444	APBD
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.425.000.000	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.785.000.000	APBD
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.120.000.000	APBD
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.884.080.130	APBD
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.025.000.000	APBD
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	130.522.537.032	APBD
17	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	349.987.989	APBD
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	722.999.939	APBD
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.286.893.740	APBD
20	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	508.078.494	APBD
21	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	109.989.830	APBD
22	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	582.379.585	APBD
23	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.607.548.672	APBD
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.238.163.461	APBD
25	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	221.035.710	APBD
26	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.355.824.840	APBD
27	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.997.910.834	APBD
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.770.888.861	APBD
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.477.016.563	APBD
30	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	331.632.526	APBD
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	288.352.978	APBD
32	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	304.290.275	APBD
33	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	42.476.075	APBD
34	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	27.156.553	APBD
35	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	38.254.769	APBD
36	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	43.999.793	APBD
37	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	82.843.180	APBD
38	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	747.796.621	APBD
39	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	18.297.726	APBD
40	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	36.823.580	APBD
41	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	86.496.166	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
42	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	64.650.382	APBD
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.888.537.459	APBD
44	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	170.000.019	APBD
45	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	294.999.576	APBD
46	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	51.793.985	APBD
47	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	16.293.040	APBD
48	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	58.107.984	APBD
49	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	32.584.506	APBD
50	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	14.972.227	APBD
51	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	384.258.835	APBD
52	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	528.539.326	APBD
53	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.916.061.000	APBD
54	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	13.482.870	APBD
55	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	106.299.599	APBD
56	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	112.000.115	APBD
57	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	39.999.857	APBD
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.688.081.346	APBD
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.752.278.305	APBD
60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.801.684.973	APBD
61	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.498.200	APBD
62	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.269.718.332	APBD
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	714.466.816	APBD
64	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	263.400.000	APBD
65	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.483.316.024	APBD
66	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.388.600.000	APBD
67	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.260.841.787	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
68	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.557.727.023	APBD
69	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	60.451.500	APBD
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.373.790.825	APBD
71	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.082.217.982	APBD
72	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.492.785.045	APBD
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.332.146.010	APBD
74	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.499.800	APBD
75	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	406.770.000	APBD
76	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25.000.000	APBD
77	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	416.875.000	APBD
78	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.199.089.000	APBD
79	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.302.238.437	APBD
80	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	106.568.140	APBD
81	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	112.478.218	APBD
82	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	495.128.176	APBD
83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.211.530.762	APBD
84	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	907.973.869	APBD
85	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.565.209.024	APBD
86	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000	APBD
87	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	144.166.996	APBD
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	68.291.650	APBD
89	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.133.698.728	APBD
90	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	294.097.983	APBD
91	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	866.700.309	APBD
92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.886.690.180	APBD
93	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	277.214.280	APBD
94	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.731.273.922	APBD
95	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.728.272.760	APBD
96	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.164.893.823	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
97	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.488.185.323	APBD
98	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	250.000.000	APBD
99	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.008.535.050	APBD
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.581.195.328	APBD
101	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.755.075.168	APBD
102	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.143.360.980	APBD
103	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	231.307.819	APBD
104	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	259.990.000	APBD
105	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	8.743.445.339	APBD
106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.385.679.181	APBD
107	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.838.352.585	APBD
108	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	31.500.109	APBD
109	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	252.000.000	APBD
110	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	45.539.519	APBD
111	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	18.431.814.643	APBD
112	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	40.000.030	APBD
113	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	266.620.948	APBD
114	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.645.396.625	APBD
115	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.639.502.006	APBD
116	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	538.962.518	APBD
117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.499.902.202	APBD
118	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	25.368.261.847	APBD
119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.216.308.249	APBD
120	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	474.908.664	APBD
121	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	147.924.874	APBD
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.297.167.827	APBD
123	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	257.476.249.772	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
124	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	864.966.533	APBD
125	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.344.861.320	APBD
126	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.024.111.336	APBD
127	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.760.207.539	APBD
128	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	93.600.825	APBD
129	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	205.009.775	APBD
130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.033.267.683	APBD
131	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.504.127.703	APBD
132	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	52.401.600	APBD
133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.287.850.816	APBD
134	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.577.265	APBD
135	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	418.493.030	APBD
136	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.797.930	APBD
137	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.851.830	APBD
138	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.564.665	APBD
139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.241.597.082	APBD
140	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	68.117.800	APBD
141	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	19.998.858.085	APBD
142	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	97.041.171	APBD

Rp **1.812.062.326.491**

Painan, 25 Oktober 2023

Bupati Pesisir Selatan



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.